



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERANAN DAN PENGARUH KREDIT PT. BANK PERKREDITAN
RAKYAT (PT. BPR) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA
INDUSTRI PENGOLAHAN**

SKRIPSI



**RONI RAHMADI
05914029**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**PERANAN DAN PENGARUH KREDIT PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT (PT. BPR) TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL
PERTANIAN DI KOTA SOLOK
(STUDI KASUS PT. BPR SOLOK SAKATO)**

Oleh

RONI RAHMADI
05 914 029

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN**



MILIK
**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR**

TANGGAL : _____

NOMOR BI : _____

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

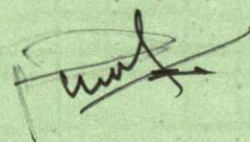
**PERANAN DAN PENGARUH KREDIT PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT (PT. BPR) TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL
PERTANIAN DI KOTA SOLOK
(STUDI KASUS PT. BPR SOLOK SAKATO)**

Oleh

RONI RAHMADI
05 914 029

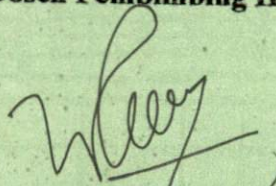
Menyetujui

Dosen Pembimbing I



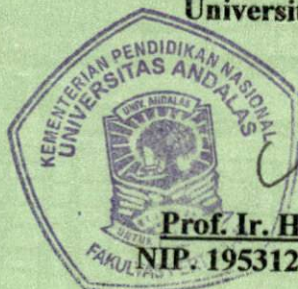
Drs. Rusdja Rustam, M.Ag
NIP. 195805021988031003

Dosen Pembimbing II



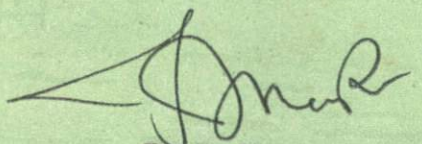
Widya Fitriana, S.P., M.Si
NIP. 132 310 757

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



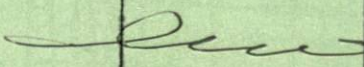
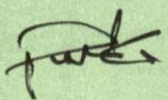
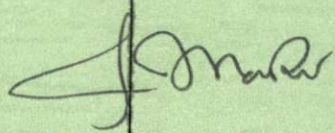
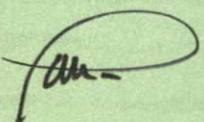
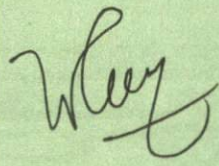
Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc
NIP. 195312161980031004

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian**



Dr. Ir. Yonariza, M.Sc
NIP. 196505051991031003

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, pada bulan Juni 2010.

No	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1	Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc		Ketua
2	Drs. Rusdja Rustam, M.Ag		Sekretaris
3	Dr. Ir. Yonariza, M.Sc		Anggota
4	Ir. Yusri Usman, M.S		Anggota
5	Widya Fitriana, S.P, M.Si		Anggota



BIODATA

Penulis dilahirkan di Sinabang (Simeulue/Aceh) pada Tanggal 12 Mei 1987 sebagai anak ke lima dari enam bersaudara, dari pasangan Ismardy Isnoer dan Cut Surya. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di Sekolah Dasar Negeri No.4 Sinabang (Simeulue timur) (1993-1999). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditempuh di SLTP Negeri No.3 Sinabang (Simeulue Timur), lulus tahun 2002. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditempuh di SMU PGRI 1 Padang, lulus tahun 2005. Pada tahun 2005 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.

Padang, Juni 2010

Roni Rahmadi

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul : " Peranan dan Pengaruh Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Terhadap Perkembangan Usaha Industri Pengolahan Hasil Pertanian di Kota Solok (Studi Kasus PT. BPR Solok Sakato)".

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Bapak Drs. Rusdja Rustam, M.Ag, dan Ibu Widya Fitriana, SP, M.Si, sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk, saran, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc, Bapak Dr. Ir. Yonariza, M.Sc, Bapak Dr. Mahdi, SP, M.Si, dan Bapak Ir. Yusri Usman, MS atas petunjuk, saran, masukan, dan kesempatan diskusi yang penulis terima. Dan selanjutnya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Pengajar di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Karyawan-karyawan DEKANAT, Tata Usaha, dan Perpustakaan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian atas segala bantuan yang penulis terima sehingga selesainya skripsi ini.

Tak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Solok Sakato di Kota Solok dan pimpinan industri pengolahan hasil pertanian di Kota Solok yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini, atas segala kerja samanya memberikan semua fasilitas baik moril maupun materil yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu memberikan saran dan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena keterbatasan waktu, pengetahuan, serta kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi proses penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Padang, Juni 2010

RR

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Usaha Kecil dan Menengah	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Bank dan BPR	9
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit	13
2.4 Prosedur Penyaluran dan Pengambilan Kredit	17
2.4.1 Permohonan Kredit	18
2.4.2 Analisis Kredit	19
2.4.3 Persetujuan Kredit	20
2.4.4 Perjanjian Kredit	20
2.4.5 Pencairan Kredit	21
2.4.6 Pengawasan Kredit	22
2.4.7 Pelunasan Kredit	23
2.5 Peranan Bank Terhadap Industri Kecil Menengah	23
2.6 Penelitian Terdahu	25
 III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	27
3.2 Metode Penelitian	27
3.3 Metode Pengambilan Responden	28
3.4 Metode Pengumpulan Data	28

3.5 Variabel Yang Diamati.....	29
3.6 Analisa Data	31
3.6 Pengertian Operasional.....	32

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT.BPR Solok Sakato yang Menyalurkan Kredit pada Industri Kecil Menengah Pengolahan Hasil Pertanian di Kota Solok.....	33
4.1.1 Sejarah Berdirinya PT.BPR Solok Sakato.....	33
4.1.2 Usaha yang Dijalankan Oleh PT.BPR Solok Sakato.....	34
4.1.3 Struktur Organisasi PT.BPR Solok Sakato.....	36
4.1.4 Mekanisme Perjanjian Kredit Modal Kerja Untuk Usaha Kecil dan Menengah pada PT.BPR Solok Sakato.....	40
4.1.4.1 Perkembangan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Usaha untuk Usaha Kecil dan Menengah Pada PT.BPR Solok Sakato.....	40
4.1.4.2 Kriteria Usaha yang diberikan Kredit Pada PT.BPR Solok Sakato.....	41
4.1.4.3 Bunga Pinjaman Pada PT.BPR Solok Sakato.....	42
4.2 Gambaran Umum Industri Pengolahan Hasil Pertanian di Kota Solok.....	43
4.2.1 Gambaran Umum Industri yang Meminjam Kredit pada PT.BPR.....	43
4.2.2 Gambaran Umum Industri yang Tidak Meminjam Kredit Pada PT.BPR.....	46
4.2.3 Proses Pelaksanaan Pengajuan Kredit pada PT.BPR Solok Sakato.....	48
4.2.3.1 Proses Pelaksanaan Pengajuan Kredit Untuk Usaha Kecil dan Dan Menengah.....	48
4.2.3.2 Pelaksanaan Pengajuan Kredit yang di Jalankan Oleh IKM.....	53
4.2.3.3 Pelaksanaan Pengambilan Kredit yang Dijalankan Oleh IKM.....	54

4.2.4 Kredit yang diterima IKM Pengolahan Hasil Pertanian....	55
4.3 Kesesuaian Pelaksanaan Prosedur Pengajuan dan Pengembalian Kredit yang Ditetapkan PT.BPR dengan Pelaksanaan yang Dijalankan IKM.....	60
4.4 Identifikasi Alasan-Alasan yang Menyebabkan Responden IKM Masih Sedikit Meminjam Kredit pada PT.BPR Memanfaatkan Kredit untuk Menunjang Perkembangan Usahanya.....	65
4.5 Perkembangan Industri yang Menerima Kredit dari PT.BPR.....	69
4.5.1 Perkembangan Volume Produksi dan Penjualan Usaha Yang Menerima Kredit.....	69
4.5.2 Perkembangan Daerah Pemasaran Industri Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit di BPR.....	70
4.5.3 Penggunaan Tenaga Kerja Industri Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit di BPR.....	72
4.5.4 Perkembangan Tingkat Keuntungan Industri Sebelum dan Sesudah Meminjam Kredit di BPR.....	73
4.5.4.1 Penerimaan.....	73
4.5.4.2 Biaya-Biaya Produksi.....	74
4.5.4.3 Keuntungan.....	81
4.6 Peran dan Pengaruh Kredit terhadap UKM Industri Pengolahan Produk Pertanian di Kota Solok.....	81
 V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
 DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Halaman</u>
1. Siklus Perkreditan dimulai Dari Pengajuan Permohonan Kredit Hingga disetujui, dicairkan, diawasi dan Pelunasan Kredit.....	18
2. Struktur Orgaisasi PT. BPR Perkreditan Rakyat Solok Sakato.....	36

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1. Perkembangan Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR Solok Sakato Dari Tahun 2004 – 2008.....	40
2. Perincian Jenis Usaha Yang Diberikan Kredit Oleh PT BPR Solok Sakato Tahun 2008.....	41
3. Gambaran Umum tentang Jenis Usaha, Alamat, Awal Berdiri Industri, Jenis Produk, Tenaga Kerja, dan Izin Usaha.....	44
4. Gambaran Jumlah Produksi, Hari Produksi Aset yang Dimiliki, Harga Produk.....	45
5. Gambaran Umum tentang Lokasi Usaha, Awal Berdiri Usaha, Jenis Produk, Tenaga Kerja dan Izin Usaha.....	46
6. Gambaran Jumlah Produksi, Jumlah Hari Produksi, Aset yang Dimiliki, dan Harga Produk.....	48
7. Jumlah Kredit yang Diajukan dengan Jumlah Kredit yang Diterima Responden.....	56
8. Waktu Peminjaman, Jaminan dan Jangka Waktu Peminjaman.....	57
9. Lama Proses Pencairan Kredit dan Alasan-Alasannya.....	58
10. Alokasi Penggunaan Kredit yang Diberikan pada PT.BPR.....	59
11. Pelaksanaan Prosedur Pengajuan dan Pengembalian Kredit oleh BPR dengan IKM Pengolahan Hasil Pertanian di Kota Solok.....	60
12. Tanggapan responden yang tidak menjadi nasabah kredit PT. BPR terhadap pengetahuan umum BPR, Pelayanan di BPR dan manfaat BPR.....	65
13. Alasan-Alasan yang Menyebabkan Responden Tidak Pernah Meminjam Kredit dari BPR.	66
14. Persentase Alasan Industri yang Paling Dominan yang Menyebabkan Industri Masih Sedikit Sekali Meminjam Kredit di PT.BPR.....	68
15. Perkembangan Volume Produksi dan Penjualan Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit.....	69

16. Perkembangan daerah pemasaran industri sebelum dan sesudah mendapatkan kredit.....	71
17. Perkembangan Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit.	72
18. Penerimaan masing-masing industri sebelum mendapatkan kredit.....	73
19. Penerimaan masing-masing industri sesudah mendapatkan kredit.....	73
20. Biaya bahan baku yang dikeluarkan industri sebelum meminjam di BPR.....	74
21. Biaya bahan baku yang dikeluarkan industri sesudah meminjam di BPR.....	75
22. Biaya solar yang dikeluarkan industri sebelum meminjam di BPR.....	75
23. Biaya solar yang dikeluarkan industri sesudah meminjam di BPR.....	75
24. Biaya kayu bakar yang dikeluarkan industri sebelum meminjam di BPR.....	76
25. Biaya kayu bakar yang dikeluarkan industri sesudah meminjam di BPR.....	76
26. Jumlah Tenaga kerja dan upah yang digunakan oleh industri sebelum mendapat kredit dari BPR.....	78
27. Jumlah Tenaga kerja dan upah yang digunakan oleh industri sesudah mendapat kredit dari BPR.....	78
28. Besarnya biaya asam cuka yang dikelurkan oleh masing-masing industri sebelum meminjam di BPR.....	79
29. Besarnya biaya asam cuka yang dikelurkan oleh masing-masing industri setelah meminjam di BPR.....	79
30. Besarnya bunga pinjaman yang dikelurkan oleh BPR kepada industri..	80
31. Besarnya keuntungan industri sebelum dan sesudah meminjam di BPR.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1. Perkembangan Industri Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2009 di Kota Solok	91
2. Nama-nama BPR di Kota Solok Tahun 2007.....	92
3. Nama-nama Industri Pengolahan Hasil Pertanian di Kota Solok.....	93
4. Data Kucuran Kredit yang diberikan PT.BPR Solok Sakato per 31 Desember 2007 sampai 31 April 2009 di Kota Solok.....	95
5. Daftar Nama Perusahaan/IKM Pengolahan Hasil Pertanian Tahun di Kota Solok.....	97
6. Daftar Nama IKM Pengolahan Hasil Pertanian yang terlibat peminjaman dengan PT.BPR Solok Sakato di Kota Solok Tahun 2009.....	98
7. Kriteria Golongan Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja dan Omset tahun 2007.....	99
8. Biaya Produksi per Industri Sebelum Menerima Kredit.....	100
9. Biaya Produksi per Industri Setelah Menerima Kredit.....	101
10. Biaya Penyusutan Industri Sebelum Menerima Kredit.....	102
11. Biaya Penyusutan Industri Setelah Menerima Kredit.....	104
12. Total Biaya Produksi per Industri Sebelum Menerima Kredit.....	106
13. Total Biaya Produksi per Industri Setelah Menerima Kredit.....	107
14. Keuntungan Industri Sebelum Menerima Kredit.....	108
15. Keuntungan Industri Sesudah Menerima Kredit.....	109
16. Persentase Kenaikan Peralatan dalam Proses Produksi.....	110
17. Penggunaan Biaya Pemasaran.....	111
18. Banyaknya Produk yang di Pasarkan Setelah meminjam di BPR.....	112
19. Persentase Penggunaan Kredit oleh IKM yang Meminjam Kredit.....	113
20. Dokumentasi Industri Kecil Menengah yang Meminjam Kredit.....	114
21. Dokumentasi Industri Kecil Menengah yang Tidak Meminjam Kredit..	115

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam GBHN telah dijelaskan bahwa prioritas pembangunan utama diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong kesempatan berusaha (Soekartawi, 2003).

Pertanian mempunyai arti penting dalam pembangunan perekonomian bangsa. Pemerintah telah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan dimasa mendatang. Sektor pertanian tidak hanya sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi penduduk, tetapi juga sumber penghidupan bagi 50% penduduk Indonesia. Selain itu, pertanian juga merupakan sumber pendapatan ekspor (devisa) serta pendorong dan penarik bagi tumbuhnya sektor-sektor lain (Nainggolan, 2005).

Strategi pembangunan pertanian yang berwawasan agroindustri dan agribisnis merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan yaitu : menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien dan fleksibel, menciptakan nilai tambah, meningkatkan penerimaan devisa, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki pembagian pendapatan (Soekartawi, 2000).

Maraknya industri kecil di Negara-negara berkembang mendapat perhatian yang serius dan menjadi salah satu prioritas dalam pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan dalam meningkatkan stabilitas ekonomi di suatu daerah (Tambunan, 1999).

Menurut Susilobroto (2001), potensi yang dimiliki oleh usaha kecil cukup besar. Usaha kecil sudah mampu memainkan peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Sumbangannya dalam berbagai sektor pembangunan tidak perlu disangsikan lagi seperti penyerapan tenaga kerja dan perluasan lapangan usaha.

Industri kecil merupakan bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Program pembangunan industri di Sumatera Barat telah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan agroindustri berskala usaha kecil dan menengah dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di daerah sampai ke pedesaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja setempat atau berdampak positif terhadap pembangunan program industri padat modal dan padat karya (Depperindag, 2001).

Salah satu kota di Sumatera Barat yang pertumbuhan agroindustri berskala usaha kecil dan menengah yang sekarang sedang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun adalah Kota Solok. Pada tahun 2006, tercatat unit industri pengolahan hasil pertanian yang ada di Kota Solok sebanyak 51 unit dengan jumlah tenaga kerja 283 orang. Pada tahun 2007 tercatat 53 unit industri dengan tenaga kerja sebanyak 297 orang dan pada tahun 2008 tercatat 60 unit industri dengan tenaga kerja sebanyak 348 orang (Lampiran 1).

Dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian, seringkali menghadapi beberapa tantangan, salah satu tantangan itu adalah lemahnya sektor permodalan. Sementara faktor modal merupakan unsur esensial dalam mendukung dan meningkatkan produksi serta taraf hidup masyarakat golongan kecil atau menengah, dimana meningkatnya taraf hidup ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Kekurangan modal ini sangat membatasi ruang gerak aktivitas usahanya yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan karena fungsi modal dalam pertanian adalah mempercepat dan mempertinggi produksi (Nasution, 1997).

Hal ini disebabkan karena sedikitnya lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan yang bergerak pada sektor tersebut. Sebagian besar bank-bank konvensional hanya bergerak pada sektor *corporate* yang hanya memberikan pinjaman ke perusahaan-perusahaan besar dan pada akhirnya setelah terjadinya krisis banyak para kreditur/perusahaan tersebut tidak mampu melunasi kewajibannya (Syukrina, 2003).

Menurut Munawir (1995), kekurangan modal kerja dalam perusahaan dapat membahayakan kontinuitas karena berkurangnya kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dan tergantungnya pembiayaan untuk kegiatan sehari-hari, secara tidak langsung hal ini juga akan mengurangi profitabilitas perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Salah satu lembaga formal yang ada di pedesaan yang memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat desa khususnya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan sistem bagi hasilnya mencoba menggeser sistem bunga yang telah ada sebelumnya. BPR sebagai lembaga perkreditan rakyat memiliki peran yang sangat penting. Selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan, juga memberikan kredit di pedesaan yang ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah sehingga masalah permodalan yang menjadi ciri umum masyarakat pedesaan dapat ditunjang dengan kehadiran BPR ini. Apalagi BPR merupakan lembaga formal dalam menyediakan bantuan modal seperti kredit murah bagi pembangunan usaha-usaha produktif masyarakat dan mampu membantu terciptanya diversifikasi pembangunan desa, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Darmawi, 1993).

Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan (Malayu, 2004). Untuk itu, didirikan PT. BPR Solok Sakato dengan Akte Notaris No. 21 tertanggal 26 Februari 2001 yang dibuat oleh Notaris Anasrul Jambi, SH di Jakarta. Yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI semenjak tanggal 02 Desember 2002 dengan No. C-23709 HT. 01.01 TH. 2002, dengan modal dasar sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Dan pendirian BPR ini dengan maksud untuk mendorong ekonomi pedesaan yang langsung menyentuh masyarakat terutama usaha produktif (PT. BPR Solok Sakato, Kota Solok, 2008).

1.2. Perumasan Masalah

Menyadari bahwa kehadiran Bank sebagai sarana peminjaman modal bagi Industri Kecil Menengah (IKM) sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mendirikan BPR di tiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk Kabupaten Solok (Lampiran 2). Kegiatan operasional BPR dapat terlaksana apabila ada kepercayaan, karena tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap BPR, sebaliknya tanpa ada kepercayaan BPR terhadap masyarakat maka kegiatan operasionalnya tidak akan berjalan dengan baik.

Berkembangnya IKM di Kota Solok dapat menopang stabilitas ekonomi serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja setiap tahun. Tercatat Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2008 nama-nama industri pengolahan hasil pertanian sebanyak 60 unit industri dengan tenaga kerja sebanyak 348 orang. Bertambahnya IKM setiap tahun memberikan dampak berkurangnya pengangguran di Kota Solok (Lampiran 3). Dalam menjalankan aktifitas usahanya, IKM tentu saja mengalami berbagai masalah yang akan menghambat tujuan yang ingin dicapai. Salah satu masalah yang paling mendasar dalam produktifitas IKM adalah permodalan. Kurangnya modal yang dimiliki suatu usaha diharapkan tidak menjadi penghambat yang dapat menghentikan suatu usaha yang ingin dikembangkan, dengan tersedianya lembaga keuangan pemerintah dan swasta yang ada di Kota Solok tentunya dapat menjadi alternatif untuk mengatasi masalah permodalan bagi usaha kecil dan menengah.

Lembaga perbankan sangat tepat untuk membantu mengembangkan sektor agribisnis, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Keberadaan bank tentu saja menjadi oase ditengah permasalahan essential bagi pengusaha kecil dan menengah. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk dapat merencanakan dan menjalankan serta mengawasi program-program yang berkaitan dengan pengembangan industri kecil dan menengah.

Dari pra survey yang dilakukan pada PT. BPR Solok Sakato yang menjadi objek penelitian ini menyediakan fasilitas kredit untuk mengembangkan dan

memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah. Adapun fasilitas kredit tersebut : 1) Khusus untuk investasi dan modal kerja, 2) Khusus untuk usaha yang sedang berjalan, 3) Khusus untuk usaha yang produktif, 4) Suku bunga bersaing, 5) Discount bagi yang tidak pernah terlambat membayar angsuran, 6) Jangka waktu maksimal 36 bulan, 7) Kredit konsumtif untuk Pegawai/Guru.

Jumlah peminjaman kredit yang diberikan PT. BPR Solok Sakato kepada masyarakat untuk jenis penggunaan modal, investasi, konsumsi ataupun sektor ekonomi mengalami peningkatan setiap tahun (Lampiran 4). Sementara itu yang dilakukan pada IKM, terdapat 60 IKM pengolahan hasil pertanian di Kota Solok, yang terdiri dari industri roti/kue, industri kerupuk, industri tahu, industri pelumatan buahan dan sayuran, industri pengolahan kopi, dan industri makanan lainnya yang ada di Kota Solok (Lampiran 5), hanya terdapat 4 industri yang melakukan peminjaman modal usahanya pada BPR (Lampiran 6).

Dari data tersebut, menjadi suatu bukti bahwa keberadaan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan kredit masih sedikit sekali ditengah ramainya IKM di Kota Solok. Tetapi tidak dipungkiri pula bahwa masih sedikit industri yang memanfaatkan keberadaan bank bagi kelangsungan usahanya. Dalam hal ini tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi layak atau tidaknya suatu usaha mendapatkan pinjaman dari bank.

Sedikitnya Jumlah IKM yang meminjam di PT. BPR secara umum dikarenakan banyaknya persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi. Mulai dari dokumen pribadi hingga surat proposal usaha, dokumen jaminan, perizinan serta surat keterangan pembayaran pajak tahunan. Dari aspek penyebaran, bank komersial umumnya terkonsentrasi di daerah perkotaan, sedangkan sebagian kecil IKM tersebar di pedesaan. Akibatnya dalam hubungan kerja antara kedua pelaku ekonomi ini terdapat jarak lokasi yang cukup besar.

Usaha yang menggunakan modal sendiri tentu saja berdampak positif bagi pengelola IKM daripada harus meminjam di bank, tetapi umumnya modal yang dimiliki IKM belum menunjang keseluruhan kebutuhan usaha yang dijalankannya.

Untuk itu, bank mempunyai peranan penting membantu keterbatasan modal disamping modal pribadi yang dimiliki suatu industri.

Bukan tidak mungkin suatu usaha kecil dan menengah akan menjadi lebih maju dan berkembang dengan ketersediaan modal yang cukup dan manajemen yang baik. Oleh karena itu, para pengusaha kecil dan menengah perlu mendapat informasi dan referensi yang cukup untuk mampu mengatasi permasalahan yang muncul, sehingga resiko yang ada dapat diminimalisir dengan baik sehingga program pembangunan industri kecil di Sumatera Barat yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan agroindustri dan agribisnis berskala kecil dan menengah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah sampai kepedesaan dapat terwujud sehingga dapat menyerap tenaga kerja setempat.

Berdasarkan uraian diatas, menimbulkan suatu pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan, penyaluran dan pengembalian kredit yang dilaksanakan oleh bank dengan yang dilaksanakan oleh IKM? Alasan-alasan mengapa IKM yang ada di Kota Solok masih sedikit sekali meminjam di PT. BPR Solok Sakato? serta sejauh mana perkembangan usaha IKM yang meminjam kredit pada PT. BPR Solok Sakato di Kota Solok. Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “ **Peranan dan Pengaruh Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Terhadap Perkembangan Usaha Industri Pengolahan Hasil Pertanian di Kota Solok (Studi Kasus PT. BPR Solok Sakato)**”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengevaluasi prosedur penyaluran dan pengambilan kredit bagi IKM yang mengolah hasil pertanian terhadap PT. BPR Solok Sakato.
2. Untuk mengidentifikasi alasan-alasan apa saja yang menyebabkan IKM masih sedikit sekali meminjam kredit di PT. BPR Solok Sakato.
3. Untuk menganalisis peranan dan pengaruh kredit PT. BPR Solok Sakato terhadap perkembangan usaha IKM yang mengolah hasil pertanian di Kota Solok.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan IKM yang mengolah hasil pertanian bagi pemerintah Kota Solok.
2. Memberikan informasi kepada IKM tentang peranan PT. BPR. Terhadap permodalan usahanya.
3. Memberikan informasi IKM yang akan mengajukan permohonan kredit (pembiayaan) pada BPR.
4. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Industri Kecil Menengah IKM dalam memanfaatkan keberadaan kredit BPR bagi perkembangan usahanya.
5. Sebagai bahan pertimbangan serta informasi bagi peneliti yang berminat dengan masalah BPR.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan agroindustri atau industri pengolahan hasil pertanian merupakan kelanjutan dari pembangunan pertanian karena agroindustri mampu meningkatkan pendapatan para pelaku bisnis, mampu menyerap tenaga kerja, mampu meningkatkan perolehan devisa dan mampu mendorong munculnya industri lain (Soekartawi, 1999).

Usaha industri adalah usaha yang termasuk bergerak dalam kegiatan proses perubahan suatu bahan atau barang menjadi bahan lain yang berbeda bentuk dan sifatnya yang mempunyai nilai tambah. Kegiatan ini dapat berupa produksi atau industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, kerajinan, bahan bangunan. Budidaya sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan kegiatan penangkapan ikan termasuk jenis usaha produksi (Wibowo, 2002).

Usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia nasional mempunyai kedudukan, peranan dan potensi yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan pada umumnya dan tujuan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil juga mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas terhadap masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam menunjang stabilitas ekonomi (Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1996).

Menurut Anonim (2004) tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) ini ternyata perkembangannya masih jauh dari diharapkan. UKM hanya menjadi sasaran program pengembangan dari berbagai institusi pemerintah, namun program pengembangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu, berdasarkan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 ditetapkan program pokok pengembangan Usaha Kecil Menengah, yaitu: (1) Program Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif, (2) Program peningkatan akses kepada sumber daya produktif dan (3)

Program pengembangan kewirausahaan berkeunggulan kompetitif.

Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat menjadi motor pembangunan baru, dengan laju pertumbuhan tinggi meskipun produktivitas per tenaga kerjanya masih rendah. Dibutuhkan minimal 4% pertumbuhan ekonomi untuk dapat menyerap tambahan tenaga kerja baru. Sementara penciptaan kesempatan kerja disektor formal belum dapat mengakomodasinya. Meskipun begitu, sektor formal memiliki kelebihan seperti: nilai tambah lebih tinggi, perlindungan tenaga kerja lebih baik, *tax base* untuk memperbaiki iklim, ini merupakan argumen untuk secepatnya mentransformasi pelaku UKM non – formal ke sektor formal. Usaha Kecil Menengah (UKM) memerlukan reformasi disektor ekonomi mikro, antara lain untuk mengatasi masalah seperti *government failure* (iklim usaha, diskriminasi terhadap UKM), sumber daya manusia dan teknologi (Anonim, 2003).

Berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha kecil di Indonesia dalam 5 bagian besar adalah :

1. Masalah permodalan, meliputi akses kepada lembaga keuangan dan tingkat suku bunga.
2. Masalah pemasaran, meliputi penentuan harga dan sistem pembayaran, persaingan usaha dan jaringan pemasaran.
3. Masalah SDM, meliputi rendahnya produktifitas pekerja, efektifitas pelatihan, dan tidak adanya pendampingan.
4. Masalah pengadaan bahan baku, meliputi ketersediaan, tata niaga, harga, kualitas dan sistem pembelian bahan baku.
5. Masalah lainnya, meliputi masalah-masalah yang terkait dengan teknologi, proses kemitraan, infrastruktur dan peran pemerintah, (Tambunan, 1999).

2.2. Tinjauan Umum tentang Bank dan BPR

Kegiatan perbankan pertama kali mulai dikenal pada zaman Babilonia. Kemudian berkembang ke zaman Yunani Kuno dan zaman Romawi. Asal kata bank itu sendiri adalah dari bahasa Italia *banco* yang berarti bangku. Bangku inilah yang

dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasional perusahaan kepada para nasabahnya. Pada awal bank didirikan kegiatan utamanya hanya sebatas tempat tukar-menukar uang. Tapi pada perkembangannya kegiatan operasional perbankan bertambah menjadi tempat penyimpanan dan peminjaman uang. Di Indonesia perkembangan perbankan juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda lah yang memperkenalkan dunia perbankan kepada masyarakat Indonesia. Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang. Banyak bank milik Belanda yang di nasionalisir oleh pemerintah Indonesia menjadi bank milik pemerintah Indonesia (Kasmir, 2003).

Menurut Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah lembaga keuangan yang berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Bank mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena bank adalah :

1. Pengumpul dana dari SSU (*Surplus Spending Unit*) dan penyalur kredit kepada DSU (*Defisit Spending Unit*)
2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat
3. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis dan ekonomis,
4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C
5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi (Malayu, 2004).

Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992, menyebutkan bahwa jenis-jenis bank terdiri atas :

1. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2002).

Bank umumnya bertujuan melaksanakan berbagai jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lainnya (Suyatno, 2003).

Kegiatan bank umum pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) kegiatan utama, yaitu :

1. Perkreditan
2. Pemasaran (*Marketing*)
3. Pendanaan (*Treasury*)
4. Kegiatan unit bank yang membantu kegiatan unit utama bank (*operatiaoons*)
5. pengelolaan SDM (*Human Resources*)
6. Pengawasan (*Audit*)

Sedangkan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi : (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, (b) memberikan kredit, (c) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, (d) menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan dari pihak lain (UU Perbankan no.10 tahun 1998 pasal 13).

Pengertian bank perkreditan rakyat menurut undang-undang no. 7 tahun 1992 pasal 1 adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu (Untung, 2000).

Menurut Badrudin (2008), ada dua pengertian BPR, yaitu BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut dan ditulis BPR Konvensional) dan BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang tidak diperkenankan melakukan kegiatan secara konvensional (selanjutnya disebut dan ditulis Bank Syariah).

Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah didaerah perkotaan. (Melayu, 2004).

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan bank umum, namun jumlah jasa bank yang dilakukan BPR lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah jasa yang dilakukan oleh bank umum. Hal ini disebabkan banyaknya persyaratan yang membatasi ruang gerak BPR sehingga tidak seeluasa bank umum.

Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dalam bentuk :
 - b. Simpanan tabungan
 - c. Simpanan deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - a. Kredit investasi
 - b. Kredit modal kerja
 - c. Kredit perdagangan

Menurut Kasmir (2003), Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima simpanan giro
2. Mengikuti kliring

3. Melakukan kegiatan valuta asing
4. Melakukan kegiatan perasuransian

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat adalah perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah (pasal 21 ayat 2 UU no. 7/1992). Sedangkan isi pasal 23 UU no.7 /1992 adalah Bank perkreditan rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga Negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya (Kasmir, 2005).

Ketentuan menurut isi pasal 23 UU no.7 /1992 tersebut dimaksudkan untuk melindungi BPR, yang beroperasi dikota-kota kecil atau pedesaan, sehingga orang asing tidak bisa ikut memilikinya. Sejalan dengan itu, eksistensi lembaga perkreditan yang sudah ada di pedesaan tetap diakui, sekalipun harus menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Hal ini ditegaskan dalam pasal 58 UU no.7/1992, yang masih tetap berlaku bahwa bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, Lumbung Pitih Negari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberi status sebagai BPR berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Rindjin, 2003).

2.3. Tinjauan Umum tentang Kredit

Perkataan kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang berarti kepercayaan, atau "*credo*" yang berarti saya percaya. Jadi bila seseorang memperoleh kredit, berarti dia memperoleh kepercayaan. Dengan perkataan lain kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau suatu badan lainnya bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu (Sudarsono, 2002).

Kredit menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran yang akan dilakukan atau ditanggihkan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati (Mulyono, 1999). Rangkaian kegiatan bank yang paling utama adalah perkreditan, perkreditan juga merupakan bagian dari aktifitas terbesar suatu perbankan. Penghasilan terbesar bank adalah dari bunga, provisi, komisi yang diterima sebagai akibat dari pemberian kredit bank. Resiko yang terbesar yang dialami bank juga berasal dari kegiatan pemberian kredit. Maka dari pada itu, pada prosedur pengajuan dan pemberian kredit pada nasabah harus dianalisis dan di seleksi dengan cermat agar pihak bank tidak mengalami resiko kredit bermasalah. Kredit bermasalah timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban nasabah untuk membayar angsuran bunga maupun bunga yang telah ditetapkan bank (Dendawijaya, 2005).

Menurut Djumhana (2003), unsur penting dalam kegiatan kredit adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi. Sedangkan dipandang dari segi debitur, adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut, ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi mengakibatkan adanya resiko yang berupa ketidaktentuan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Tujuan dasar kredit dimaksudkan untuk pencapaian satu tujuan tertentu yang tidak boleh merugikan tujuan lainnya, bahkan harus saling menunjang atau dapat dicapai bersama. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang melalui suatu analisis dan penelitian yang cermat untuk mencegah terjadinya kerugian bagi bank (Santoso, 1999).

Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank

yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan atau dipinjamkan akan pasti kembali (Kasmir, 2004).

Beberapa fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan yaitu :

1. Sistem kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang
3. Kredit dapat menjadi alat stabilitas ekonomi
4. Dapat meningkatkan gairah berusaha
5. Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan sebagainya (Suyatno, 1992).

Menurut Sumodiningrat (1999), sistem kredit yang ideal harus mencerminkan adanya sistem yang dikelola sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, menguntungkan bagi lembaga keuangan yang bersangkutan, juga menguntungkan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang ideal haruslah mempunyai cirri social dan ekonomi. Ciri sosial yakni kebersamaan yang dapat membawa aspirasi masyarakat dan menguntungkan masyarakat. Sedangkan ciri ekonomi, menerapkan prinsip ekonomi dengan menerapkan prosedur dan kriteria perbankan. Sedangkan peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator yang berfungsi menjadi pembimbing dan pengarah yang dilakukan secara efektif guna mewujudkan suasana yang mendukung, menjamin keberlanjutan pengembangan usaha masyarakat.

Sebelum kredit diberikan, maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar kembali, maka untuk itu biasanya bank akan melakukan penilaian kredit sebelum kredit itu disalurkan. Menurut Kasmir (2003), biasanya penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit , dilakukan dengan analisis 5C, yaitu :

1. *Character*, merupakan sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit yang dapat dilihat dari latar belakang nasabah, keadaan keluarga, gaya hidup dan lain sebagainya.

2. *Capacity*, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar kredit.
3. *Capital*, berguna untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif atau tidak, yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Selain itu, juga perlu menganalisis sumber modal.
4. *Condition*, meliputi penilaian kondisi ekonomi, social dan politik serta penilaian terhadap kondisi atau prospek bidang usaha.
5. *Colleteral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan serta harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya.

Dalam suatu kredit, harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar kredit ini bisa diberikan, yaitu :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa barang atau jasa, benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya, dalam suatu kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya pemberian suatu kredit. Makin panjang pengembalian suatu kredit, maka makin besarlah resikonya.

5. Balas jasa

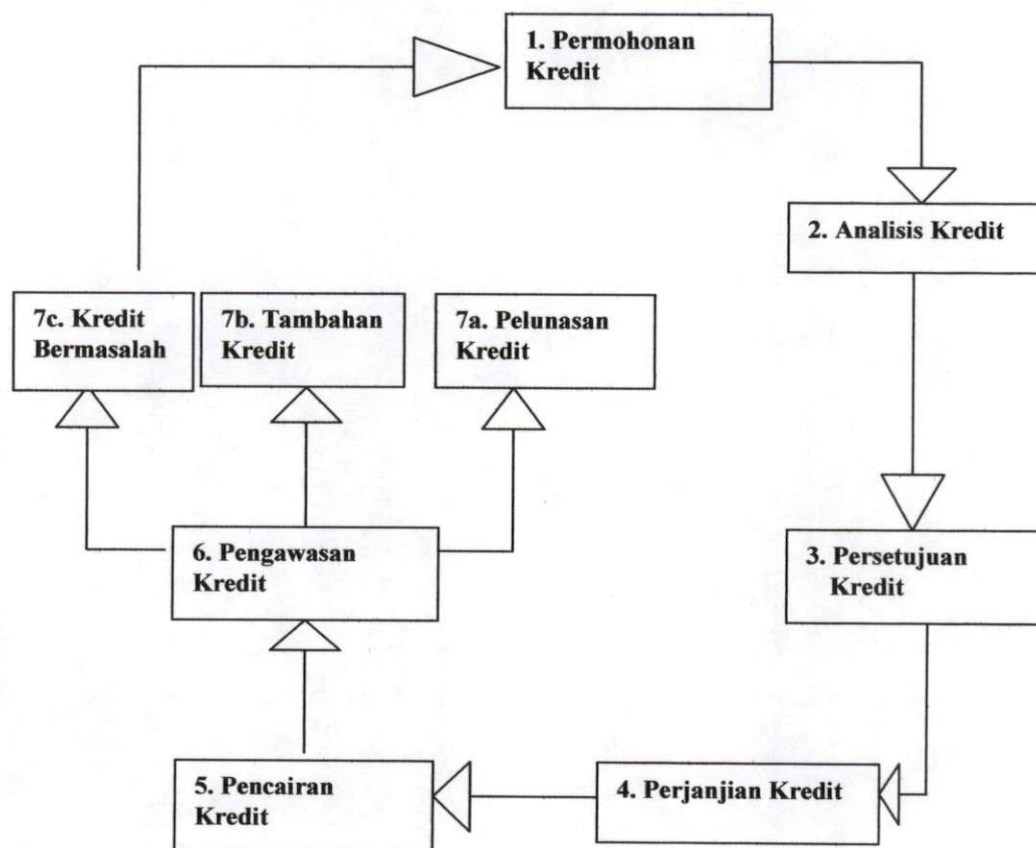
Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. dalam bank konvensional, balas jasa ini dikenal dengan sebutan bunga. disamping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan pendapatan bank (Kasmir, 2002).

Ditinjau dari penggunaannya, kredit dibedakan atas kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk melancarkan pembiayaan suatu usaha produktif. Sedangkan kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup (Hadiwidjaja dan Wirasmita, 2000). Batubara (2005) mengatakan bahwa kredit yang disalurkan ke daerah pedesaan pada umumnya dimaksudkan untuk tujuan produktif. Namun karena kebutuhan konsumtif belum terpenuhi, maka pengalihan tujuan kredit tidak dapat dihindarkan.

2.4. Prosedur Penyaluran dan Pengembalian Kredit

Penggolongan kredit terdiri atas enam bentuk yaitu : a) penggolongan kredit berdasarkan tujuannya, b) penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu, c) penggolongan kredit berdasarkan penggunaannya, d) penggolongan kredit berdasarkan barang jaminan, e) penggolongan kredit berdasarkan segmen usaha dan, f) penggolongan kredit non kas. Kredit berdasarkan tujuannya terdiri dari kredit komersil, kredit konsumtif, kredit produktif. Kredit berdasarkan jangka waktu terdiri dari kredit jangka pendek, jangka menengah dan kredit jangka panjang. Penggolongan kredit berdasarkan penggunaannya terdiri dari kredit modal kerja dan investasi. Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan bank untuk menambah modal kerja debitur, sedangkan kredit investasi adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan yang digunakan untuk melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal. Kredit non kas adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang telah diperjanjikan telah direalisasikan (Siamat, 1999).

Program penyaluran kredit yang akan diberikan pada calon nasabah akan melalui berbagai tahapan yang disebut siklus kredit. Siklus perkreditan dimulai dari pengajuan permohonan kredit hingga akhirnya disetujui, dicairkan, diawasi dan pelunasan kredit. Secara grafis dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus perkreditan dimulai dari pengajuan permohonan kredit hingga disetujui, dicairkan, diawasi dan pelunasan kredit.

2.4.1. Permohonan Kredit

Tahap awal yang harus dijalankan calon nasabah adalah permohonan pengajuan kredit kepada bank termasuk beberapa dokumen-dokumen lain, yaitu :

1. Surat permohonan resmi.
2. Akte pendirian usaha yang merupakan perusahaan yang akan memohon kredit, sekaligus menjelaskan siapa yang akan berwenang meminta kredit dan bertanggung jawab terhadap kewajiban nasabah kredit seperti

- pelunasan angsuran kredit beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.
3. Penjelasan atau uraian singkat tentang rencana usaha/ bisnis yang telah/ akan dijalankan oleh calon nasabah.
 4. Laporan keuangan perusahaan/ catatan pembukuan usaha.
 5. Informasi lainnya mengenai :
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b) Keterangan domisili dari perusahaan.
 - c) Izin-izin yang telah diperoleh dalam rangka pembangunan atau pendirian usaha yang telah berjalan.
 - d) Rekening perusahaan pada bank lain.

Dalam permohonan tersebut, umumnya calon nasabah diminta untuk mengisi berbagai formulir standar baku yang sudah disediakan oleh bank untuk melengkapi hal-hal yang disampaikan oleh calon nasabah. Formulir standar ini bentuknya bermacam-macam, tergantung pada :

- a) Jenis usaha.
- b) Jenis industri dari usaha/ bisnis yang akan dibantu bank.
- c) Jenis kredit yang diminta.
- d) Besarnya biaya usaha/ bisnis.
- e) Besarnya jumlah kredit yang akan diminta.
- f) Jaminan yang akan diberikan (Denda wijaya, 2005).

2.4.2. Analisis kredit

Setelah permohonan kredit diterima oleh pihak bank (*account officer*), maka nasabah diminta untuk memberikan keterangan tambahan yang menjelaskan isi dari berbagai dokumen yang diberikannya kepada pihak bank. Keterangan-keterangan tersebut bisa disampaikan langsung secara lisan melalui wawancara (*interview*) maupun secara tertulis sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh penyelia kredit (*account officer*) dari bank.

Selanjutnya *account officer* melakukan analisis kredit berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dalam bank dan biasanya tergantung pada jenis kredit yang diminta oleh calon nasabah. Secara umum, analisis kredit yang dilakukan pihak bank adalah berdasarkan metode, yaitu :

1. Metode “5 C” yang meliputi : *character, capital, capacity, condition of economy, collateral*.
2. Metode “6 A” yang meliputi aspek hukum, pasar, teknis, manajemen, keuangan dan sosial ekonomi (Denda wijaya, 2005).

2.4.3. Persetujuan Kredit

Analisis yang dibuat oleh *account officer*, akan diperiksa dulu oleh atasannya sebelum disampaikan pada direksi bank. Laporan analisis kredit bermacam-macam, antara lain adalah laporan analisis kredit, analisis permohonan kredit, laporan rekomendasi kredit, laporan kelayakan usaha/ bisnis dan lainnya. Atas dasar laporan analisis tersebut, pembahasan dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh lembaga yang mungkin berbeda-beda, tergantung pada sistem dan prosedur yang berlaku pada masing-masing bank. Pada beberapa bank umum, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh satu komite yang dibentuk direksi yang disebut “komite kredit”. tugas komite ini adalah : a) Memeriksa laporan analisis kredit, b) Menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah, c) Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit seperti tingkat bunga, jangka waktu peminjaman, jenis dan besarnya jaminan dan persyaratan lain yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi penyusunan perjanjian akad kredit yang dibuat dihadapan notaris (Denda wijaya, 2005).

2.4.4. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dipersiapkan oleh seorang notaris publik yang telah ditunjuk oleh pihak bank berdasarkan kesepakatan dengan calon nasabah. Bank mengutus ahli hukumnya untuk mendampingi *account officer* dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian kredit. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagian besar diambil dari hasil analisis kredit yang dituangkan dalam laporan analisis kredit

yang telah disetujui (termasuk revisi atau perubahan yang ditetapkan oleh komite kredit maupundireksi bank). Secara umum, isi perjanjian kredit yang dibuat notaris berdasarkan masukan dari pihak bank, adalah :

1. Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan).
2. Pihak penerima kredit (perusahaan calon nasabah).
3. Tujuan pemberian kredit (tergantung pada bisnis atau usaha yang akan dilaksanakan, diperluas, direhabilitasi, ditambah modal kerjanya, biaya produksi dan lainnya).
4. Besarnya kredit yang akan diberikan oleh bank.
5. Tingkat bunga pinjaman kredit.
6. Biaya-biaya lain yang harus dibayar calon nasabah kredit (biaya profesi, administrasi, notaris dan lainnya).
7. Jangka waktu pengembalian kredit (angsuran kredit).
8. Jadwal pembayaran angsuran kredit dan pembayaran bunga kredit yang ditulis secara rinci.
9. Jaminan kredit serta cara pengikatannya secara hukum yang dinyatakan secara terperinci.
10. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit dicairkan.
11. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi calon nasabah selama kredit belum dilunasi.
12. Hak- hak yang dimiliki bank selama kredit belum melunasi kredit, berupa : memeriksa laporan keuangan, keadaan usaha dan lainnya.

Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris publik tersebut ditandatangani oleh tiga pihak (bank, nasabah dan notaris) serta dicatat dan didaftarkan oleh notaris pada pengadilan negeri sesuai dengan domisili dari bank pemberi kredit sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak (Denda Wijaya, 2005).

2.4.5. Pencairan Kredit

Pencairan kredit hanya dapat direalisasikan jika debitur telah memenuhi segala persyaratan seperti yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang

ditandatangani kedua pihak (bank dan debitur), serta dicatat pada notaris publik. Persyaratan pencairan kredit meliputi : a) Perjanjian kredit yang sudah ditandatangani, b) Penarikan kredit sudah sesuai dengan kebutuhan usaha/ bisnis, c) penarikan kredit sudah sesuai dengan jadwal mula usaha, d) Permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit, dan e) Besarnya kredit harus sesuai dengan perbandingan atau rasio yang telah disepakati antara dana yang bersumber dari debitur dan pembiayaan bank. Pencairan kredit dari bank dapat dilakukan dengan cara langsung dikirimkan ke rekening nasabah dan adapula yang dialamatkan pada rekening perusahaan/ industri yang menjadi rekanan nasabah misalnya supplier, pemasok, kantor notaris, kantor konsultan dan sebagainya (Dendawijaya, 2005).

2.4.6. Pengawasan Kredit

Kegiatan pengawasan kredit mempunyai berbagai aspek yaitu : (1) Adanya administrasi kredit yang memadai dengan menggunakan cara-cara yang mutakhir, seperti penggunaan computer, *on line system* dan lainnya., (2) Keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit seperti laporan produksi, laporan penjualan, laporan utang piutang perusahaan, laporan keuangan, laporan tenaga kerja, laporan asuransi dan lainnya, (3) keharusan bagi penyelia kredit untuk melakukan kunjungan ke perusahaan/ industri yang dibiayai oleh bank, baik selama berlangsungnya pembangunan perusahaan maupun setelah bisnis tersebut berjalan, (4) adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama pada saat debitur mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadi kemacetan kredit. Dengan konsultasi yang dilakukan secara dini akan dapat mengurangi atau menekan resiko terjadinya kegagalan usaha atau kredit macet, (5) adanya sistem peringatan pada administrasi bank. Peringatan dini akan dapat memperlihatkan kepada penyelia kredit berbagai informasi tentang kepatuhan nasabah kredit pada ketentuan yang telah disepakati.

Monitoring atau pengawasan kredit yang dilakukan bank setelah kredit dicairkan oleh bank merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pemberian kredit selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. terjadinya kegagalan kredit (kredit macet/ bermasalah) terutama disebabkan oleh kelalaian bank dalam menjalankan pengawasan kredit (Dendawijaya, 2005).

2.4.7. Pelunasan Kredit

Dalam pemberian dan pembayaran angsuran kredit, tidak sedikit yang mengalami kredit bermasalah. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kegagalan pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi angsuran kredit dan bunga yang telah disepakati. Kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang telah dibuat Bank Indonesia, adalah :

1. Kredit lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pinjaman dan bunga.

2. Kredit dengan perhatian khusus

Kredit dengan perhatian khusus ini terjadi penunggakan mulai dari 1 hari s/d 90 hari dari waktu yang dijanjikan.

3. Kredit kurang lancar

Adalah kredit yang pengembaliannya mengalami penunggakan > 90 hari s/d 180 hari dari waktu yang telah dijanjikan.

4. Kredit diragukan

Kredit diragukan adalah kredit yang pengembaliannya mengalami penunggakan > 180 hari s/d 270 hari dari waktu yang telah dijanjikan.

5. Kredit macet

Adalah kredit yang pengembalian angsurannya mengalami penunggakan > 270 hari dari waktu yang telah dijanjikan (Dendawijaya, 2005).

2.5. Peranan Bank terhadap Industri Kecil dan Menengah

Menurut Purbo (2007), industri kecil sudah mampu memainkan peran yang

strategis dalam perekonomian nasional. Sumbangannya dalam berbagai sektor pembangunan tidak perlu disangsikan lagi, seperti penyerapan tenaga kerja, perluasan lapangan usaha dan kontribusinya terhadap penerimaan devisa. Seperti sektor IKM yang memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar.

Kemampuan pengusaha kecil dan menengah untuk memperoleh pinjaman/kredit dari perbankan masih relatif rendah. Diantara penyebab-penyebabnya adalah kekurangmampuan mereka dalam memenuhi syarat teknis perbankan seperti penyusunan proposal, jaminan dan sebagainya. Perbankan sendiri sering menghadapi kendala dalam menyalurkan kredit bagi pengusaha kecil seperti tingginya biaya transaksi, keterbatasan jaringan, sumber daya manusia dan ruang lingkup aktivitas perbankan. Akhirnya pengusaha kecil cenderung untuk mencari sumber dana lain yang prosedur pencairannya lebih mudah walaupun bunganya lebih tinggi dibanding dengan yang ditawarkan perbankan (Suyatno, 1995).

Usaha yang berskala kecil merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis. Selama krisis ekonomi, laju perekonomian Indonesia digerakkan oleh sektor industri kecil dan pertanian. Hal ini disebabkan industri kecil sangat adaptif dan fleksibel dalam menghadapi situasi krisis ekonomi (Siregar, 2000).

Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah perlu melaksanakan berbagai kebijakan yang memungkinkan perbankan dapat dengan mudah menyalurkan kredit untuk usaha kecil dan menengah. Tetapi karena adanya prinsip *prudential* perbankan, maka kebijakan kredit belum sepenuhnya membantu akses usaha kecil dan menengah kepada kredit perbankan. Prinsip prudensial adalah prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional bisnis bank (Zulkarnaen, 2003).

Langkah konkrit yang perlu dicermati dari kebijakan pemerintah dalam pembiayaan usaha kecil adalah : 1.) Dilaksanakan kebijakan secara konsisten agar tujuan mengangkat kegiatan usaha ekonomi masyarakat ini kekancah perekonomian nasional dapat terealisasi dengan baik, 2.) Melakukan sosialisasi pembiayaan secara transparan, terutama kepada yang memiliki potensi ekspor dimasa yang akan datang, 3.) Menghindari birokrasi yang berbelit-belit agar pola pembiayaan berjalan efektif

tanpa mengabaikan kaidah-kaidah dan prosedur peminjaman yang layak, 4.) Melakukan pembinaan secara kontinyu dan terpadu untuk menghindari kredit macet, 5.) menciptakan bisnis sinergi (*business synergy*) dalam lingkaran kemitraan yang saling menguntungkan (Zulkarnaen, 2003).

Peranan penting perbankan terhadap pengembangan industri kecil dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya kredit yang disalurkan pada masyarakat, yang nantinya pertumbuhan industri kecil tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap penanggulangan masalah-masalah ekonomi dan sosial disuatu daerah (Tambunan, 1999).

Hadirnya bank ditengah maraknya pemberdayaan agribisnis, tentu saja dapat memberikan sinergi yang kuat bagi para pengusaha kecil dan menengah dalam mengatasi kendala-kendala dalam menjalankan usahanya terutama masalah keterbatasan modal dan menejemen yang kurang baik (Tambunan, 1999).

2.6. Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan Gustaviany (2003) mengenai perbandingan pengelolaan penyaluran dan pengembalian kredit antara BPR Syariah dengan BPR Konvensional di PT BPR Sungai Puar dan PT BPRS Carana Kiat Andalas Kecamatan Banuhmapu Sungai Puar, terlihat secara umum penyaluran dan pengembalian kredit untuk pertanian dikedua BPR masih sangat kecil. Pada PT BPR Sungai Puar persentase penyaluran kredit untuk pertanian pada tahun 2002 hanya sebesar 2 % dari total penyaluran kredit. Sedangkan pada PT BPRS Carana Kiat Andalas persentase penyaluran kredit untuk pertanian pada tahun 2002 hanya sebesar 1 % dari total penyaluran kredit. Kecilnya persentase penyaluran kredit/ pembiayaan untuk pertanian pada kedua BPR ini antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan petani itu sendiri untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit.

Penelitian yang dilakukan Harti (2008) mengenai peranan BPR terhadap perkebunan dan perdagangan karet pada PT BPR Koto VII Kecamatan KotoVII Kabupaten Sijunjung, menunjukkan bahwa secara umum mekanisme penyaluran dan pengembalian kredit perkebunan dan perdagangan karet pada PT BPR Koto VII

masih kurang sesuai dengan prosedur yang ada, terutama dalam pemberlakuan sanksi berupa penarikan jaminan kredit atas keterlambatan pengembalian kredit oleh nasabah. Sehingga jalan yang sering ditempuh pihak BPR untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperpanjang waktu pembayaran angsuran kredit bagi nasabah tersebut.

Basri (2000), dari hasil penelitiannya pada BPR Sungai Puar dengan BPRS Carana Kiat Andalas di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar menyatakan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh calon nasabah masyarakat tani maupun sektor pertanian pada BPR Sungai Puar dan BPRS Carana Kiat Andalas adalah tidak adanya jaminan yang memadai, kondisis usaha yang tidak stabil, birokrasi yang sulit, tingkat suku bunga yang tinggi dan adanya sumber pinjaman dari pihak lain.

Penelitian yang dilakukan Putra (2008) tentang pengaruh program dana bergulir dalam peningkatan UKM di Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa secara umum adanya dana bergulir ternyata mampu meningkatkan jumlah produksi dan keuntungan industri setelah memperoleh kredit tersebut. Rata-rata peningkatan keuntungan industri setelah menerima kredit adalah 26.49 % dan rata-rata peningkatan jumlah produksi adalah sebesar 35.54 %. Peningkatan ini terjadi dikarenakan kredit yang diberikan digunakan untuk kegiatan produksi usaha.

III. METODA PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di PT. BPR Solok Sakato, Kota Solok yang beralamat di Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang No. 273 C Air Mati Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. PT. BPR ini dipilih dengan sengaja (*purposive*) di Kota Solok dengan pertimbangan jika dilihat dari perkembangan modal selalu meningkat, ini terbukti dari jumlah nasabah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Lampiran 2). Serta pemilihan PT. BPR Solok Sakato sebagai tempat penelitian dikarenakan dari 2 PT. BPR yang ada di kota Solok, yakni : PT. BPR Solok Sakato dan PT. BPR Surya Katialo, jika dilihat dari jumlah IKM yang meminjam di kedua PT. BPR tersebut yang paling sedikit adalah PT. BPR Solok Sakato yakni berjumlah 4 IKM pengolahan hasil pertanian yakni : Industri Roti/Kue, Industri Tahu “CNG”, Industri Bubuk Kedelai dan Jahe, dan Industri Tahu (Lampiran 5), sedangkan yang meminjam di PT. BPR Surya Katialo sebanyak 7 IKM pengolahan hasil pertanian.

Penelitian akan dilakukan selama dua bulan, terhitung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Universitas Andalas, Padang.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus merupakan penelitian status subjek yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Studi kasus memungkinkan penelitian dapat lebih mendalam sehingga dapat menjawab mengapa suatu keadaan terjadi dan dapat diketahui hubungan-hubungan yang diluar perkiraan. Studi kasus lebih menekankan mengkaji variabel yang cukup banyak pada unit yang kecil (Nazir, 2003).

Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai perkembangan IKM pengolahan hasil pertanian yang menerima kredit dari PT. BPR masih sangat sedikit sekali. Dimana dalam hal ini akan dilihat sejauh mana peranan dan pengaruh BPR

sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit bagi perkembangan usaha IKM pengolahan hasil pertanian, mengapa serta memberikan informasi tentang prosedur penyaluran dan pengambilan kredit oleh BPR di Kota Solok.

3.3 Metode Pengambilan Responden

Dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Solok, terdapat beberapa IKM pengolahan hasil pertanian yang memiliki izin usaha. Jumlah keseluruhan populasi industri kecil dan menengah pengolahan hasil pertanian di Kota Solok adalah 60 industri (Lampiran 3). Dari 60 unit industri tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan jenis produk yang dihasilkan yaitu Industri Roti/Kue yang berjumlah 21 unit, industri Tahu berjumlah 8 unit, dan industri bubuk kedelai berjumlah 3 unit kemudian diambil 20% dari masing-masing kelompok IKM yang akan menjadi sampel pada penelitian ini. Menurut Gasperz (1990), jumlah populasi yang dapat diambil sebagai sampel dari jumlah populasi bisa 20% dari total populasi.

Dari 4 (Empat) kelompok unit usaha tersebut, diambil 4 Industri Roti/Kue, 2 Industri Tahu dan 1 Industri Bubuk Kedelai untuk mewakili sampel dalam penelitian ini dalam kategori usaha yang tidak menerima kredit dari PT. BPR. Sedangkan sampel IKM yang menerima kredit dari PT. BPR berjumlah 4 IKM (Lampiran 6). Dengan demikian, total sampel adalah 11 industri.

Sampel dalam penelitian ini dipilih secara sengaja (*Purposive*) dengan pertimbangan bahwa industri yang dipilih menjadi sampel untuk industri yang tidak menerima kredit dari PT. BPR adalah industri kecil yang aktifitas proses produksinya sama dengan yang menerima kredit dari PT. BPR dan juga masih masih tergolong industri kecil menengah. Berdasarkan data dari DEPPERINDAG, kriteria industri kecil yang digolongkan menurut jumlah tenaga kerja dan omset perusahaan adalah berjumlah 5-19 orang dengan omset Rp.1 Milyar kebawah (Lampiran 7).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder yang ada dalam penelitian.

1. Data primer

Merupakan data yang diambil dari wawancara dan diskusi langsung dengan direktur, kepala seksi kredit, dana dan umum. Data yang dikumpulkan diantaranya gambaran umum tentang PT. BPR Solok Sakato, Kota Solok, kegiatan usaha meliputi tabungan, deposito dan kredit serta nasabah/IKM yang meminjam modal di PT. BPR.

2. Data sekunder

Merupakan data yang berbentuk tulisan atau dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, dalam hal ini data yang dikumpulkan berasal dari sumber bacaan dan lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitian ini, PT. BPR Solok Sakato di Kota Solok, DEPERINDAG, BPS, internet, serta dari literatur yang relevan.

3.5 Variabel yang Diamati

Adapun variable yang diamati dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan pertama mengenai pelaksanaan, prosedur penyaluran dan pengambilan kredit bagi masyarakat yang mengolah produknya dibidang pertanian terhadap PT. BPR adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme pengajuan kredit oleh IKM kepada PT. BPR
2. Penilaian kredit oleh BPR terhadap IKM yang akan meminjam
3. Perjanjian Kredit antara BPR dan IKM yang akan meminjam
4. Jumlah kredit yang diterima
5. Lamanya proses pengajuan sampai pencairan kredit
6. Mekanisme pengambilan kredit oleh IKM
7. Pengawasan kredit
8. Sanksi yang diberikakan pada nasabah yang tidak tepat waktu pembayaran kredit
9. Pembinaan yang diberikan oleh BPR pada penerima kredit
10. Pemanfaatan kredit yang diterima.

Untuk tujuan kedua, mengidentifikasi alasan-alasan apa saja yang membuat IKM masih sangat sedikit sekali meminjam di PT. BPR untuk menunjang perkembangan dalam usahanya, maka variabelnya adalah :

Tanggapan responden yang tidak menjadi nasabah kredit PT. BPR dilihat dari aspek :

1. Pengetahuan umum tentang bank
2. Pelayanan di bank
3. Manfaat bank
4. Informasi kredit di bank
5. Permasalahan/ alasan yang menyebabkan tidak memanfaatkan kredit.

Untuk tercapainya tujuan ketiga, yakni mengetahui peranan dan pengaruh kredit PT. BPR terhadap perkembangan usaha IKM yang mengolah hasil pertanian di Kota Solok ditinjau dari peningkatan pendapatan responden IKM pengolahan hasil pertanian sebelum mendapatkan kredit dari PT. BPR (tahun 2007) dan setelah mendapatkan kredit dari PT. BPR (tahun 2008), dimana tolak ukur satuan yang akan menjadi landasan dalam hal ini adalah satu kali produksi pada masing-masing IKM yang meminjam kredit pada PT. BPR Solok Sakato di Kota Solok. Maka variabel yang akan diteliti untuk mengetahui peranan kredit PT. BPR adalah :

1. Modal IKM
2. Jumlah kredit yang disalurkan kepada IKM
3. Pemanfaatan kredit oleh IKM

Sedangkan variabel yang diteliti untuk mengetahui pengaruh kredit PT. BPR adalah :

1. Volume produksi dan penjualan
2. Perkembangan daerah pemasaran
3. Jumlah tenaga kerja
4. Tingkat keuntungan

3.6 Analisa Data

Untuk tujuan pertama, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan, prosedur penyaluran dan pengambilan kredit bagi IKM pengolahan hasil pertanian terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT.BPR). Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif. Data yang bersifat kualitatif berasal dari informan kunci yaitu dari pihak PT. BPR. Penelitian kualitatif mengutamakan penguasaan mendalam atas fenomena secara material.

Tujuan kedua, yaitu mengidentifikasi alasan-alasan apa saja yang menyebabkan IKM belum/ tidak memanfaatkan keberadaan bank untuk menunjang modal dalam usahanya, maka data yang didapat akan dianalisa secara deskriptif. Data yang akan didapat dari informan kunci yang menggunakan modal pribadi akan dilakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka mulai dari pengetahuan umum IKM tentang bank sampai pada pertanyaan inti yang menyangkut alasan-alasan yang menyebabkan IKM tersebut belum memanfaatkan bank. Setelah itu akan dapat dilihat dan diidentifikasi alasan apa yang paling dominan dari seluruh tanggapan responden. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena, karakteristik individual situasi atau kelompok tertentu secara akurat (Danim, 2002).

Untuk tujuan ketiga yaitu menganalisa peranan dan pengaruh kredit PT. BPR terhadap perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan hasil pertanian di Kota Solok. maka dari segi peranan, data yang di dapat dari pihak PT. BPR dan IKM akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan cara melihat kegunaan/fungsi kredit PT.BPR untuk menambah modal IKM, berapa besar kredit yang disalurkan kepada IKM, serta pemanfaatan kredit yang dilakukan oleh IKM. Sedangkan untuk menganalisa pengaruh PT. BPR terhadap perkembangan IKM pengolahan hasil pertanian, maka akan dianalisa secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan volume produksi dan penjualan, luas usaha pemasaran, jumlah tenaga kerja, serta membandingkan tingkat keuntungan industri sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman kredit dimana akan dilakukan pengamatan mengenai penggunaan faktor-

faktor produksi yang digunakan oleh IKM termasuk jenis dan harga dari masing-masing faktor produksi tersebut.

Rumus keuntungan :

$$\text{Keuntungan} = \text{Penerimaan} - \text{Total Biaya}$$

Biaya penyusutan merupakan biaya tetap yang dikenakan untuk tujuan perhitungan nilai korbanan suatu alat dalam proses produksi. Dimana biaya penyusutan alat yang akan dihitung adalah : mesin dompeng, penggiling, Tungku Uap, Bak Rebus, Cincin, Keranjang, Ember, Pisau, Cetakan, Kual, Pompa Air, mesin pengepak.

Perhitungan biaya penyusutan ini menggunakan metode garis lurus yang merupakan suatu teknik perhitungan penyusutan berdasarkan biaya awal dan nilai akhir alat.

Rumus :

$$D = \frac{P - S}{N}$$

Keterangan :

D = Besarnya penyusutan (Rp/th)

P = Harga (Rp)

S = Nilai sisa

N = Umur ekonomis

(Subanar, 1995).

3.7 Pengertian Operasional

Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan, yang berarti bahwa seseorang/kelompok atau lembaga telah melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Anonim, 2003).

Pengaruh adalah suatu kemampuan yang dapat membentuk ataupun mengubah sesuatu baik secara langsung atau tidak langsung (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT. BPR Solok Sakato.

4.1.1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Perkreditan Rakyat Solok Sakato.

Bank Perkreditan Rakyat yang dibentuk dari yayasan Gerakan Seribu Minang (Gebu Minang) didirikan sesudah keluarnya Paket Kebijakan Pemerintah pada Tanggal 27 Oktober 1988, sedangkan untuk lembaga keuangan seperti Lumbung Pitih Nagari menurut Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 diwajibkan untuk menyesuaikan bentuk badan hukum dengan ketentuan yang berlaku. Bank Perkreditan Rakyat didirikan oleh Yayasan gebu Minang dikenal dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Gaya baru, sedangkan BPR-LPN disebut dengan Bank Perkreditan Gaya lama.

PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Solok Sakato, berasal dari BPR – LPN Hilir Bandar, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 517/MK.13/1990, dengan komdisi saat diakuisisi BPR-LPN Hilir Bandar sudah tidak aktif lagi. Melalui Yayasan Gebu Minang dengan Pemerintah Daerah Sumbar bersama dengan BPR Indonesia Padang, dicarikanlah solusi supaya BPR-LPN tersebut dapat diaktifkan kembali dengan jalan meningkatkan statusnya menjadi BPR, termasuk dengan menginvestasikan modal baru. Akhirnya disepakati BPR-LPN ditingkatkan statusnya dengan suntikan dana dari 28 orang pemegang saham baru, yang mana sebagian pemegang saham terdiri dari perantau Solok yang berada di Jakarta yang mempunyai kepedulian dengan kampung halamannya.

Pendirian PT. BPR Solok Sakato dengan Akte Notaris No. 21 Tanggal 26 Februari 2001 yang dibuat oleh Notaris Anasrul Jambi, SH di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia semenjak Tanggal 02 Desember 2002 dengan Nomor. C-23709HT.01.01.TH.2002 . PT. BPR Solok Sakato telah beroperasi sejak Tanggal 14 Agustus 2002 dengan alamat Jl. Raya Solok No. 14 kab. Solok. Sejak Tanggal 6 Desember 2004 Kantor Pusat PT. BPR Solok Sakato dipindahkan Ke Jl. Datuk Perpatih Nan Sabatang No. 273 Air Mati Kota Solok, Sementara kantor BPR yang berada di Kabupaten tetap beroperasi

seperti semula sebagai kantor pelayanan kas. Dalam jangka waktu 6 tahun aset BPR terlihat terus meningkat seiring membaiknya perekonomian dan dikenalnya BPR dikalangan masyarakat.

Dalam penyaluran kredit saat ini , BPR Solok Sakato membiayai pedagang ataupun usaha kecil dan menengah yang belum terlayani oleh BPR Umum (BU). Sampai Akhir Desember 2008 BPR Solok Sakato telah memiliki aset sebesar Rp.10,5 Miliar dengan Jumlah Nasabah 10.782 nasabah tabungan dan 4.382 nasabah kredit, dengan produk unggulan "tabungan bajapauik". Dalam menjalankan operasionalnya, BPR didukung oleh 2 (dua) orang direksi, 3 (tiga) orang Staff Divisi, 2 orang Pimpinan cabang dan 25 orang karyawan. Dengan bermodal tekad PT. BPR Solok Sakato akan memperluas jaringan usahannya dengan membuka kantor cabang baru di daerah Padang dan Bukittinggi.

4.1.2. Usaha Yang Dijalankan Oleh PT. BPR Solok Sakato

Mengenai usaha dari BPR dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Meliputi :

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito Berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan Kredit
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan danannya dalam bentuk Sertifikat BPR Indonesia (SBI) Deposito Berjangka, Setifikat Deposito atau Tabungan pd. BPR lainnya.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 279/KMK.01/1989 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No.1064/KMK.00/1988 tentang pendirian dan usaha BPR dikemukakan bahwa BPR yang memperoleh izin usaha atas dasar keputusan Menteri Keuangan No. 1064/MKM.00/1988 hanya dapat menghimpun dana dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan. Jadi dengan dikeluarkannya keputusan ini maka BPR ataupun BPR-LPN tidak diperkenankan

lagi menghimpun dana-dana dari masyarakat dalam bentuk giro. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pengertian dari usaha BPR yakni :

1. Deposito berjangka adalah simpanan masyarakat kepada BPR yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan BPR.
2. Tabungan adalah simpanan masyarakat kepada BPR yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak BPR dengan yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam hal ini pemberian kredit yang dilaksanakan oleh BPR, dalam Surat Edaran BPR Indonesia No. 21/5BPPP Tanggal 27 Oktober 1988 menjelaskan :

- a. BPR dapat memberikan pinjaman untuk modal kerja berjangka pendek atau untuk investasi kepada para pedagang di pasar atau para pengusaha kecil dan menengah yang berada di wilayah solok.
 - b. BPR yang diperkenankan memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam bentuk pinjaman pencicilan, pembayaran dapat kembali dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu tertentu sehingga saldo pinjaman akan menurun sesuai dengan banyaknya atau dibayar sekaligus pada waktu pinjaman jatuh tempo.
4. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau penyertaan modal suatu Perseroan Terbatas (PT) yang diperjual belikan baik yang didalam maupun diluar pasar modal. BPR Perkreditan Rakyat merupakan suatu lembaga BPR swasta yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, maka modalnya terbagi atas saham-saham yang tentunya dalam bentuk saham atas nama yaitu saham yang dikeluarkan atas nama pemiliknya. Ini dapat dilihat dari Pasal 25 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Disamping usaha yang dilakukan BPR diatas maka menurut ketentuan Pasal 14 Undang-

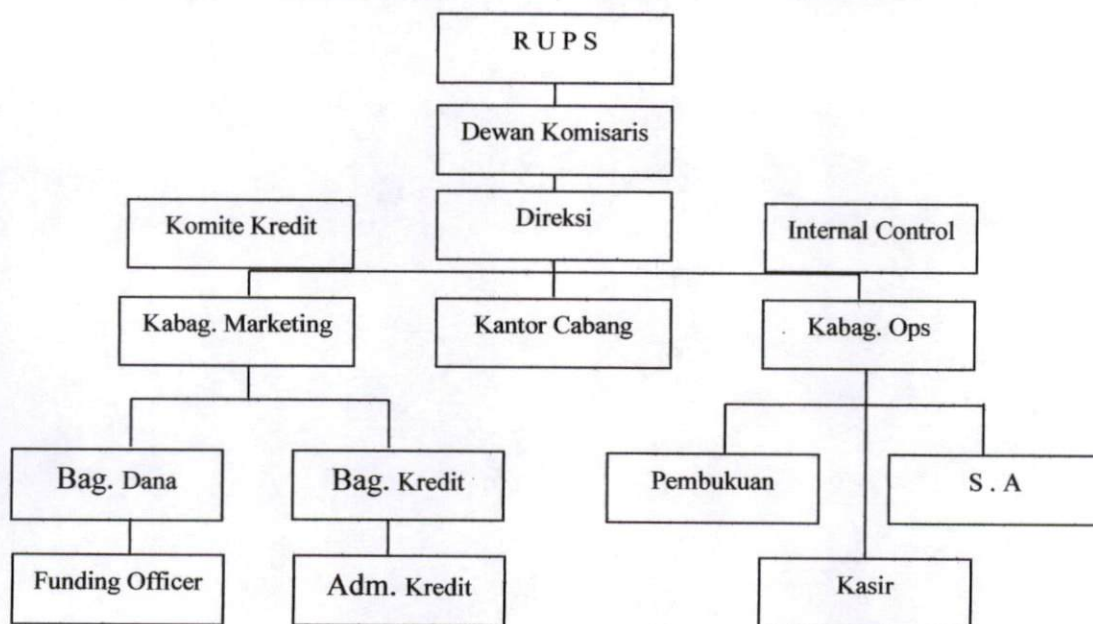
Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR dilarang untuk melakukan :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyeteroran modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPR itu sendiri.

Bentuk hukum BPR itu sendiri menurut Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dapat berupa salah satu dari: (a) Perusahaan Daerah, (b) Koperasi, (c) Perseroan Terbatas dan (d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan BPR Umum dan BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

4.1.3. Struktur Organisasi PT. BPR Perkreditan Rakyat Solok Sakato



Gambar 2. Struktur Organisasi PT. BPR Perkreditan Rakyat Solok Sakato

Keterangan :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang saham merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada PT. BPR Solok Sakato yang aplikasinya terlihat pada :

- a. Pencalonan dan pemilihan anggota dewan pengawas para pemegang saham BPR
- b. Pengusulan dan Pemberhentian Dewan Direksi
- c. Pemberian persetujuan neraca dan perhitungan rugi / laba

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah pimpinan umum kepengurusan PT. BPR Solok Sakato yang tugas pokoknya menentukan garis besar kebijaksanaan yang akan dijalankan BPR serta melakukan pengawasan terhadap operasional BPR.

Anggota dari Dewan Komisaris ini terdiri dari :

- a. Komisaris Utama
- b. Komisaris Operasioanal
- c. Anggota

3. Direksi

Direksi adalah pimpinan tertinggi yang diberikan tugas dan bertanggung jawab mengurus dan mengelola kegiatan BPR sehari-hari. Anggota direksi diangkat oleh Dewan Komisaris atas usul Rapat Umum Pemegang Saham, yang sebelum diangkat harus mendapat persetujuan prinsip dahulu dari direksi BPR Indonesia. Direksi merupakan suatu team yang terdiri dari Direktur Utama dan 2 Orang Direktur yakni Direktur Pemasaran dan Direktur Operasional.

4. Kepala Bagian Marketing

Kepala bagian kredit merupakan divisi yang mempertanggung jawabkan segala bentuk kegiatan kredit yang ada pada BPR. Mulai dari proses permohonan kredit sampai pencairan kredit.

- a. Fungsi Kepala Bagian Marketing
 1. Menjembatani kegiatan bidang komersil dan bidang operasional

2. penyaringan (*Filterisasi*) kegiatan komersil sebelum dilakukannya operasional.
 3. Memonitor kegiatan Pendanaan Kredit
 4. Sekretariat Kredit Komite
- b. Tugas Pokok Kepala Bagian Marketing
1. Mengarahkan dan membina personil-personil yang berada dalam lingkungan kredit management
 2. Memberikan legal opini terhadap pengajuan kredit serta proposal-proposal yang berhubungan dengan kredit yang masuk.
 3. Mengadakan Investigasi atas permohonan kredit yang masuk serta mengadakan penilaian terhadap barang jaminan
 4. Melakukan analisis yuridis dan financial atas proposal kredit
 5. Mengawasi kegiatan pengadministrasian kredit
 6. Mengurus serta membuat laporan hasil Meeting Credit Komite.
 7. Mengelola asuransi barang jaminan
 8. Memeriksa berkas-berkas kredit sebelum diajukan kebidang operasional untuk realisasi kredit.
 9. Melakukan review terhadap fasilitas kredit yang diberikan
 10. Memonitoring kegiatan nasabah kredit dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Direktur Pemasaran
 11. Membuat laporan bulanan kredit

Kepala Bagian Marketing ini juga melakukan pengawasan dan memonitor langsung pada bagian-bagian yang berada pada pengawasannya yakni :

1. Bagian Dana
2. Funding Officer
3. Bagian Kredit (Account Officer)
4. Administrasi Kredit

Pertanggung jawaban dari Kepala Bagian Kredit ini langsung pada Direktur Pemasaran.

5. Kepala Bagian Operasional

Kepala bagian operasional ini merupakan divisi yang diberi pertanggung jawaban untuk kepengurusan operasional BPR.

a. Fungsi Kepala Bagian Operasional

Bertanggung jawab penuh atas kegiatan Operasional yang mencakup bidang kasir, pembukuan, servis asisten dan bagian umum.

b. Tugas Pokok Kepala Bagian Operasional

1. Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi semua kegiatan personil mulai dari kasir, pembukuan dan servis asisten
2. Melaksanakan semua peraturan, ketentuan dan prosedur yang telah digariskan oleh management maupun peraturan dan ketentuan yang telah digariskan oleh BPR Indonesia.
3. Memonitor semua kegiatan operasional
4. Meneliti dan melegalisir hasil-hasil rutin bagian operasional sebelum diajukan pada Direktur Operasional untuk disampaikan/dikrimkan dalam bentuk laporan pada BPR Indonesia
5. Mengkoordinir pembuatan neraca, laporan likuiditas dan sebagai laporan untuk management.
6. Bertanggung jawab penuh atas keapsahan Neraca Harian dan Bulanan
7. Mengkoordinir pelayanan dan pemeriksaan internal BPR seperti audit petugas akuntan, petugas pengawasan dan pemeriksaan BPR-BPR
8. CQ BPR Indonesia.

Kepala Bagian Operasional ini juga melakuakn pengawasan dan memonitor langsung pada bagian-bagian yang berada pada pengawasannya yakni :

- a. Bagian Akuntansi.
- b. Petugas Kasir.
- c. Servis Asisten.
- d. Bagian Umum.

Pertanggung jawaban dari kepala bagian operasional ini langsung pada Direktur Operasional.

6. Kantor Cabang

Kantor cabang merupakan bagian yang tidak terlepas dari kantor utama Kantor cabang ini dipimpin oleh seorang Ka. Cabang yang diangkat langsung oleh Direktur Utama . Tugas pokok dari kantor cabang ini adalah :

- a. Melayani transaksi tabungan
- b. Melayani transaksi Deposito
- c. Menerima transaksi permohonan deposito berjangka
- d. Melakukan transaksi antar BPR
- e. Serta produk jasa BPR lainnya.

4.1.4. Mekanisme Perjanjian Kredit Modal Kerja Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT. BPR Solok Sakato

4.1.4.1. Perkembangan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Usaha Untuk Usaha Kecil dan Menengah Pada PT. BPR Solok Sakato.

Sejak dimulainya kegiatan penyaluran kredit usaha kecil dan menengah dari tahun 2004 sampai Juni 2008 penyaluran kredit modal kerja ini terus meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh kiat-kiat kusus yang diterapkan oleh BPR Solok Sakato disesuaikan dengan situasi di lapangan dan kondisi ekonomi yang berkembang. Sehingga dari tahun ke tahun perkembangan pemberian kredit modal kerja ini terus meningkat. Perkembangan/realisasi penyaluran kredit modal kerja ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR Solok Sakato Dari Tahun 2004 – 2008

Tahun	Pinjaman Yang Diberikan (000)	Prosentase % Kenaikan	Jumlah Nasabah	Presentase (%) Kenaikan Nasabah
2004	1.552.280,-	11.63	380	-
2005	1.853.525,-	13.89	448	17
2006	2.359.749,-	17.69	450	0,4
2007	2.952.368,-	22.13	531	18
2008	4.620.384,-	34.63	787	48

Sumber : Laporan Tahunan PT. BPR Solok Sakato Dan Data Pemberian Kredit.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2004 samapi tahun 2008 terjadi peningkatan dalam pemberian kredit. Pada tahun 2004 sampai tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 34.63% dengan peningkatan jumlah nasabah sebesar 48% .Sedangkan dana yang telah tersalurkan dalam penyaluran kredit modal kerja dalam dekade 5 (lima) tahun kedepan adalah Rp. 4.620.384,-

Sedangkan untuk melihat perincian dan jenis usaha yang diberikan kredit usaha kecil dan menengah oleh PT. BPR Solok Sakato adalah dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perincian Jenis Usaha Yang Diberikan Kredit Oleh PT BPR Solok Sakato Tahun 2008

Jenis Usaha	Jumlah (Orang)	Total Pinjaman Yang Disalurkan (000)
Pertanian	27	169.790,-
Perindustrian	17	64.993,-
Perdagangan	385	1.907.845,-
Peternakan	-	0,-
Konstruksi	-	0,-
Jasa	72	670.367,-
Lain- Lain	3.881	7.807.395,-
Jumlah	4.382	10.620.400,-

Sumber : Laporan Data Pemberian Kredi PT. BPR Solok Sakato.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor usaha yang dominan dalam penyaluran kredit modal kerja adalah sektor perdagangan Sektor-sektor yang dominan tersebut menjadi peluang bagi sektor perbankan untuk meluncurkan produk-produk perkreditan sebagai sumber pembiayaan untuk meningkatkan pemasukan masing-masing sektor perekonomian.

4.1.4.2 Kriteria Usaha Yang Diberikan Kredit Pada PT. BPR Solok Sakato.

Kriteria usaha yang diberikan Kkredit oleh PT. BPR Solok Sakato adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usaha kecil dan Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- untuk usaha menengah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Milik Warga Negara Indonesia

3. Memiliki hasil penjualan atau transaksi diatas Rp.1.000.000.000,- per tahun.
4. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi dan kelompok kerja.

Kriteria usaha yang diambil oleh PT. BPR Solok Sakato ini tidak lepas dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Intruksi Presiden No. 10 Tahun 1999 tentang Usaha Menengah. Sedangkan tingkat suku bunga yang diterapkan oleh BPR untuk usaha kecil dan menengah ini tidaklah tetap (*Fluktuatif*) yang mana ini disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh BPR Indonesia.

Dalam setiap pelaksanaan perjanjian kredit, BPR Solok Sakato selalu melakukan pengikatan jaminan/agunan pada nasabahnya. Pada IKM pengolahan hasil pertanian yang meminjam kredit yaitu yaitu Industri tahu "CNG", Industri tahu "A.B" dan Industri bubuk kedelai/jahe "M.B.E" memberikan jaminan/agunan berupa sertifikat tanah. Ini bertujuan untuk mengurangi resiko tidak dibayarnya pinjaman yang dilakukan IKM pada PT.BPR Solok Sakato. Untuk itulah BPR dalam melakukan usahanya dalam pemberian kredit haruslah *selektif* dan hati – hati.

Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 bahwa untuk mengurangi terjadinya resiko dalam pemberian kredit maka BPR harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah (debitur) untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

4.1.4.3 Bunga Pinjaman Pada PT. BPR Solok Sakato.

Tingkat suku bungan yang diterapkan PT.BPR Solok Sakato adalah :

1. Pinjaman sampai dengan Rp 10.000.000 bunganya 21%
2. Pinjaman diatas Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000 bunganya 20%
3. Pinjaman diatas Rp 25.000.000 bunganya 19%
4. Pinjaman diatas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000, biaya provisi 1% dan biaya Adm 0,5%
5. Pinjaman diatas 50.000.000, biaya provisi 0,5% dan biaya Adm 0,5%

6. Nasabah diwajibkan untuk membuka rekening tabungan.

Besarnya bunga pinjaman pada IKM pengolahan hasil pertanian yang meminjam kredit pada PT.BPR Solok Sakato sesuai dengan besarnya jumlah kredit yang dipinjam oleh IKM. Pada industri tahu "CNG" ditetapkan bunga sebesar 20% karena meminjam sebesar Rp 20.000.000, Industri tahu "A.B" dan Industri bubuk kedelai/jahe "M.B.E" ditetapkan bunga sebesar 21% karena meminjam kredit sebesar Rp 10.000.000. Bunga efektif dihitung berdasarkan sisa kredit. Artinya, bunga yang ditetapkan dibayar setiap bulan dengan cicilan pokok angsuran yang telah disepakati.

4.2. Gambaran Umum Industri Pengolahan Hasil Pertanian Di Kota Solok

4.2.1. Gambaran Umum Industri yang Meminjam Kredit pada PT. BPR

a. Gambaran Umum tentang Profil Usaha

Industri Kecil dan Menengah pengolahan hasil pertanian merupakan usaha yang mengolah hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan dapat menjadi produk baru yang beranekaragam untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selain banyaknya industri pengolahan Hasil pertanian di Kota Solok yang tidak meminjam kredit di BPR, ternyata terdapat beberapa industri yang memanfaatkan kredit dari BPR untuk tambahan modal yang menunjang kekurangan modal dan perkembangan usaha yang dimilikinya. Industri yang akan dikembangkan tentu saja harus memiliki modal yang cukup untuk tetap eksis dalam menjalankan aktifitas usahanya. Kredit yang diberikan BPR tersebut akan digunakan untuk memenuhi dan menunjang segala aktifitas produksi yang sedang di jalankan. Meskipun masih tergolong usaha kecil, ternyata tidak menghalangi industri ini untuk mengajukan kredit pada BPR yang dianggap sebagian orang sangat sulit dan rumit dalam pengajuannya. Gambaran umum tentang industri yang meminjam kredit di BPR dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Gambaran Umum tentang Jenis Usaha, Alamat, Awal Berdiri Industri, Jenis Produk, Tenaga Kerja, dan Izin Usaha.

No	Jenis Usaha	Alamat	Awal Berdiri (Tahun)	Jenis Produk	Tenaga Kerja (Orang)	Izin Usaha
1	Industri Roti/Kue	Jl. Batang Lembang Kel. VI Suku Kota Solok	-	-	-	-
2	Industri Tahu "CNG"	Jl. Sersan Basir Gawan RT/RW 01/04 Kel. Tanah Garam	2002	Tahu	20	SIUP
3	Industri Tahu "A.B"	Jl. Prof Dr Hamka No.28 Lkah Pandan Kel. KTK	2004	Tahu	6	HO
4	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	Jl. Reformasi No.15 RT/RW 02/03 Kel. Simp. Rumbio	2007	Bubuk kedele, jahe murni, jahe rasa coklat	5	SIUP

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa terdapat satu industri yang tidak dicantumkan keterangan tahun berapa didirikan, produk, izin usaha, dan tenaga kerja yang digunakan. Hal ini dikarenakan industri tersebut telah tutup. Sedangkan 3 industri lainnya masih memproduksi sampai sekarang. Industri tahu "CNG" berdiri pada tahun 2002 dengan jumlah tenaga kerja 20 orang dan industri tahu A.B berdiri pada tahun 2004 dengan jumlah tenaga kerja 6 orang. Sedangkan Industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E" tergolong industri yang baru, karena industri ini baru berdiri pada tahun 2007 dengan tenaga kerja 5 orang. Umumnya industri ini mengusahakan satu jenis produk saja, kecuali pada industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E". Pada industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E" selain mengusahakan bubuk kedelai isi 200 gr dan bubuk jahe isi 200 gr, industri ini juga membuat bubuk jahe rasa coklat dengan isi 200 gr.

b. Gambaran tentang Produksi

Usaha yang menggunakan pinjaman kredit dari BPR tentu saja mempergunakan pinjaman kredit tersebut untuk aktifitas dan perkembangan usahanya, pada umumnya industri mengolokasikan sebagian pinjaman kredit yang diperoleh untuk membeli persediaan bahan baku agar bahan baku selalu tersedia dan meningkatkan jumlah produksi yang dihasilkannya, penambahan pembelian peralatan untuk produksi dan peningkatan kualitas produk baik dari segi kualitas bahan baku maupun kemasan produk untuk memperoleh harga jual yang lebih baik dipasaran. Gambaran tentang produksi, aset yang dimiliki serta harga produk dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Gambaran Jumlah Produksi, Hari Produksi Aset yang Dimiliki, Harga Produk.

Industri	Jumlah produksi dan jumlah hari berproduksi	Alat yang digunakan untuk Produksi	Harga
Industri tahu "CNG"	1500 kg/ hari (setiap hari)	Mesin dompeng, mesin penggiling, bak perebus/tungku uap, papan cetakan.	Rp. 34.000,-/papan
Industri Tahu "A.B"	800 kg/ hari (setiap hari)	Mesin dompeng, mesin penggiling, bak perebus/tungku uap, papan cetakan.	Rp .34.000,-/papan
Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	150 kg/ hari (1 x dlm 15 hari)	Alat penggongseng, penggiling, saringan, baskom	<ul style="list-style-type: none"> • Bubuk kedelai Rp.10.000/bks • Bubuk jahe Rp.8.000/bks • Bubuk jahe rasa coklat Rp.12.000/bks

Pada Tabel 4 dapat dilihat jumlah produksi paling tinggi yang dihasilkan industri yang meminjam kredit di BPR adalah pada industri tahu tahu "CNG", yaitu dengan produksi perharinya 1500 kg / hari dengan harga jual per kg nya Rp.34.000,-/papan. Sedangkan industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E" hanya menghasilkan

produksi 150 kg/ hari/ produk dengan harga per bungkusnya untuk bubuk kedelai Rp. 10.000. bubuk jahe Rp 8.000, dan bubuk jahe rasa coklat Rp 12.000.

4.2.2. Gambaran Umum Usaha yang Tidak Meminjam Modal pada PT. BPR

a. Gambaran Umum tentang Profil Usaha

Beberapa industri pengolahan hasil pertanian yang tidak melakukan pinjaman kredit di Kota Solok pada umumnya memiliki tujuan yang sama dengan industri pengolahan hasil pertanian yang melakukan pinjaman kredit di BPR dalam menjalankan usaha yaitu untuk memperoleh keuntungan yang berdampak pada perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan hidupnya. Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh data bahwa IKM yang menjadi sampel tidak dapat diambil datanya secara keseluruhan sesuai dengan karakteristik pengambilan sampel (pada bab 3) dikarenakan industri roti yang meminjam modal di BPR sudah tutup sehingga sampel industri yang tidak meminjam di BPR (sebanyak 4 industri pengolahan hasil pertanian) juga tidak diambil dengan alasan bahwa sampel yang diambil pada penelitian ini harus sesuai/sama dengan industri yang meminjam di BPR. Gambaran umum tentang usaha yang tidak meminjam kredit di BPR dalam menjalankan usahanya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Gambaran Umum tentang Lokasi Usaha, Awal Berdiri Usaha, Jenis Produk, Tenaga Kerja dan Izin Usaha.

No	Jenis Usaha	Alamat	Awal Berdiri (Tahun)	Jenis Produk	Tenaga Kerja (Orang)	Izin Usaha
1	Industi Tahu "Puteri Tunggal (PT)	Jl. Latsitarda No.7 Telp : 0755-325685	2004	Tahu	17	SIUP
2	Industri Tahu "Sumber Gizi Utama (SGU)"	Jl. Mesjid Panjang, Koto Panjang, Kota Solok	1998	Tahu	6	SIUP
3	Industri bubuk kedelai "INSTAN"	Jl. Kampung Jawa, Koto Baru, Kota Solok.	1985	Bubuk kedelai	5	SIUP

Pada Tabel 5 dapat dilihat tiga industri yang menjadi sampel dalam penelitian yang tidak meminjam kredit pada BPR Solok Sakato. Usaha ini terdiri dari jenis produk yang berbeda-beda yaitu tahu, bubuk kedelai, bubuk jahe, dan bubuk jahe rasa coklat. Umumnya industri ini merupakan usaha turun-temurun keluarga. Hal ini dapat kita lihat dari tahun industri ini berdiri yang pada umumnya berdiri pada tahun 1980-an. Karena industri tersebut termasuk industri kecil, maka penggunaan tenaga kerja yang digunakan umumnya tergolong sedikit, yaitu berkisar antara 5 sampai 17 tenaga kerja.

b. Gambaran tentang Produksi

Setiap industri menghasilkan produksi usaha dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan ketersediaan bahan baku dan bahan penunjang lainnya yang akan menentukan berapa banyak hasil produksi yang akan didapat dan dipasarkan ke konsumen. Industri cenderung meningkatkan jumlah produksinya apabila modal yang dimilikinya mencukupi dan produk yang dihasilkan banyak diminati konsumen. Tetapi sebaliknya, industri cenderung menurunkan jumlah produksinya apabila modal makin berkurang dan produk yang dihasilkan kurang laku dipasaran. Peningkatan dan penurunan jumlah produksi usaha akan mempengaruhi perkembangan usaha itu sendiri. Peningkatan produksi akan memungkinkan suatu industri untuk memperluas pemasaran dan lebih menjangkau konsumen lebih banyak dibanding produksi yang sedikit. Alat yang digunakan untuk berproduksi juga akan menunjang keefektifan kegiatan proses produksi, dengan tersedianya peralatan yang memadai akan mempengaruhi banyaknya produksi yang akan dihasilkan. Begitu pula dengan harga produk, harga akan dapat menentukan tingkat keuntungan yang akan didapatkan suatu industri. Dengan menetapkan harga yang sesuai dengan semestinya, produk akan terjual dipasaran dan industri juga akan mendapatkan keuntungan. Gambaran tentang jumlah produksi, jumlah hari produksi, alat yang digunakan dan harga produk industri yang tidak meminjam modal di BPR dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Gambaran Jumlah Produksi, Jumlah Hari Produksi, Aset yang Dimiliki, dan Harga Produk.

Industri	Jumlah produksi dan jumlah hari berproduksi	Alat yang digunakan untuk Produksi	Harga
Industri tahu "Puteri Tunggal (PT)"	1000 kg/ hari (setiap hari)	Mesin dompeng, mesin penggiling, bak perebus/tungku uap, papan cetakan.	Rp. 34.000,-/papan
Industri Tahu "Sumber Gizi Utama (SGU)"	400 kg/ hari (setiap hari)	Mesin dompeng, mesin penggiling, bak perebus/tungku uap, papan cetakan.	Rp .34.000,-/ papan
Industri bubuk kedelai "INSTAN"	100 kg/ hari (1 x dlm 7 hari)	Alat penggongseng, penggiling, saringan, baskom	Rp.8.500,-/ bks

Pada Tabel 6 dapat dilihat pada semua industri tahu berproduksi setiap seminggu, jumlah produksi industri per hari nya beragam. Pada industri tahu "Puteri Tunggal (PT) memproduksi tahu per harinya sebanyak 1000 kg, Industri tahu "Sumber Gizi Utama (SGU)" memproduksi 400 kg/hari, dimana harga jual tiap-tiap industri tahu tersebut sama yaitu Rp 34.000/papan. Sedangkan Industri bubuk kedelai "INSTAN" menghasilkan jumlah produksi sebanyak 100 kg/ hari dengan harga per bungkusnya untuk industri bubuk kedelai "INSTAN" adalah Rp 8.500.

4.2.3. Proses Pelaksanaan Pengajuan Kredit pada PT.BPR Solok Sakato

4.2.3.1. Proses Pelaksanaan Pengajuan Kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah

Proses lahirnya perjanjian kredit pada dasarnya didahului dengan penawaran dari PT BPR Solok Sakato melalui brosur dan *profil company*. Namun tidak jarang juga para nasabah debitur itu sendiri yang datang pada BPR untuk menanyakan syarat-syarat kredit.

Adapun prosedur dalam pemberian kredit oleh PT. BPR Solok Sakato adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Kredit.

Pada ketentuan tertulis yang dimuat dalam peraturan dan pelaksanaan perjanjian kredit adalah apabila peminjam atas nama perorangan maka syarat pengajuan adalah :

1. Warga Negara Indonesia, minimum berusia 21 Tahun, baik yang sudah menikah atau belum.
2. Mempunyai pengetahuan / pengalaman dalam bidang usaha yang akan dibiayai oleh BPR
3. Minimal usaha telah berjalan 1 tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Mempunyai jaminan / agunan.

Dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pinjaman oleh kreditur yaitu :

- a. Foto copy KTP suami istri
- b. Foto copy kartu keluarga 1 lembar
- c. Phas photo 3x4 2 lembar suami istri
- d. Foto copy dokumen jaminan / agunan

Bagi pemohon yang berasal dari koperasi dan kelompok kerja maka persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Memiliki akta pendirian yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
2. Mempunyai jaminan / agunan
3. Laporan keuangan (neraca dan laba rugi)
4. Foto copy akta pendirian
5. Foto copy jaminan / agunan
6. Dan lainnya yang dirasakan perlu

2. Aplikasi Kredit

Aplikasi kredit adalah suatu proses awal dari suatu analisa kredit sampai dengan persetujuan kredit. Aplikasi kredit ini merupakan pedoman atau standar yang digunakan PT BPR Solok Sakato untuk menganalisa permohonan kredit dari debitur, dengan tujuan mengetahui kelayakan usaha dan prospek usaha debitur sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit atau *review* kredit.

3 Perjanjian Kredit

Dalam surat perjanjian kredit yang berkomparasi adalah pihak PT BPR dengan debitur. Dalam surat perjanjian ini ada materi dan pasal-pasal yang dimuat dalam perjanjian kredit antara lain :

1. Komparasi adalah pihak-pihak yang mengadakan dan menandatangani perjanjian. Premisse adalah sebab diadakannya perjanjian kredit.
2. Jenis fasilitas kredit plafon dan jangka waktu kredit.
3. Pembayaran kembali yaitu debitur wajib membayar kembali kredit dengan lunas pada PT BPR Solok Sakato berikut dengan bunga dan lain-lain jumlah uang yang harus dibayar.
4. Tujuan penggunaan kredit.
5. Bunga, berdasarkan fasilitas kredit debitur berkewajiban membayar bunga kepada PT BPR Solok Sakato dengan suku bunga yang telah disepakati atau yang sedang berjalan.
6. Angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
7. Jaminan dan agunan, yang berhak menilai dan mempertimbangkan apakah jaminan tersebut cukup atau ditambah atau dikurangi adalah PT BPR Solok Sakato dan debitur wajib menjaga agar jaminan tetap dalam kondisi baik.
8. Asuransi, setiap debitur dan jaminannya wajib untuk diasuransikan.
9. Hak PT BPR Solok Sakato untuk mengakhiri perjanjian. PT BPR Solok Sakato berhak sewaktu-waktu tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu (apabila terdapat penyimpangan) dan tanpa memperhatikan jangka waktu kredit dapat mengakhiri perjanjian dan debitur wajib dengan segera dan sekaligus membayar kembali seluruh kewajibannya yang terdiri dari pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
10. Hak debitur mengakhiri perjanjiannya. Debitur berhak mengakhiri perjanjian kredit dengan pemberitahuan sebelumnya kepada BPR diikuti dengan pelunasan seluruh kewajibannya.

11. Domisili hukum, hal ini penting sekiranya kemudian hari terjadi perkara yang melibatkan pengadilan maka domisili memudahkan para pihak untuk memilih pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut.

4. Pengikatan Jaminan/ Agunan

Setelah perjanjian kredit ditandatangani maka dilanjutkan dengan pengikatan jaminan/agunan dimana pada IKM pengolahan hasil pertanian yang meminjam kredit yaitu yaitu Industri tahu "CNG", Industri tahu "A.B" dan Industri bubuk kedelai/jahe "M.B.E" memberikan jaminan/agunan berupa sertifikat tanah. Hal ini penting karena dalam pemberian kredit PT. BPR Solok Sakato dituntut melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi peningkatan kredit macet atau NPL (*Non Performing Loan*)

Untuk mengatasinya PT. BPR Solok Sakato dalam prakteknya mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan adanya agunan dalam setiap pemberian kredit modal kerja untuk usaha kecil dan menengah. Kriteria barang yang dapat dijadikan agunan adalah :

1. Mempunyai nilai ekonomis.
2. Kepemilikan dapat dipindah tangankan
3. Mempunyai nilai yuridis atau dapat diikat sehingga memberikan hak preferen .

Jenis jaminan/ Agunan yang bisa dijadikan jaminan pada PT BPR Solok Sakato adalah :

1. Kebendaan
2. Perorangan (Borgtocht) / Personal guarantee
3. Company guarantee
4. Barang bergerak
5. Barang tidak bergerak seperti :
 - a. Tanah :
 - 1) Hak milik
 - 2) Hak Guna Bangunan (HGB)
 - 3) Hak Guna Usaha (HGU)

4) Hak pakai atas tanah negara

b. Bangunan / tanaman diatas tanah negara

Terhadap barang yang diterima sebagai jaminan harus dilaksanakan pengikatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan hukum. Sebelum melakukan pengikatan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meminta kepada Debitur untuk menyampaikan tanda bukti pelunasan pajak dari instansi yang terkait.
2. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan bukti pelunasan PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) tahunan.
3. Dalam hal barang agunann milik pribadi maka kepada pihak suami dan istri diwajibkan untuk menanda tangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT / pengikatan agunan).

5. Pencairan Kredit/ Dana

Pencairan kredit dilakukan setelah ditandatangani perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang disaksikan langsung oleh direktur pemasaran dimana pencairan kredit pada industri tahu "CNG" selama 2 bulan, industri tahu "A.B" selama 7 hari dan pada industri bubuk kedelai "M.B.E" selama 15 hari . Selanjutnya direktur memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan pencairan kepada debitur. Kemudian bagian keuangan melaporkan kepada bagian adm. kredit bahwa dana telah siap untuk dicairkan.

6. Pemantauan Dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan debitur merupakan rangkaian aktifitas untuk memantau dan mengawasi perkembangan usaha nasabah dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai lunas. Pemantauan ini wajib dilakukan oleh PT. BPR Solok Sakato untuk :

1. Menilai sampai sejauh mana syarat-syarat kredit maupun kewajiban pembayaran lainnya telah dipenuhi debitur.
2. Menilai kelayakan usaha debitur dari waktu ke waktu yang dikaitkan dengan resiko yang dihadapi PT. BPR Solok Sakato

3. Membantu PT. BPR Solok Sakato mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan, serta memberi rekomendasi kepada debitur dalam peningkatan usaha kerja dan keuangan

Dengan disepakati perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Solok Sakato maka menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus diterima dan dipatuhi oleh kedua belah pihak yang mana menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian mempunyai "Asas Pasta Sunt Servanda" yang artinya bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak harus disepakati sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak. Maka jelaslah setiap perjanjian harus senantiasa dapat diupayakan untuk dilaksanakan oleh para pihak karena memang demikianlah yang sesungguhnya diharapkan oleh para pihak dengan dibuatnya suatu perjanjian tersebut.

4.2.3.2 Pelaksanaan Pengajuan Kredit yang Dijalankan oleh IKM

a. Gambaran pelaksanaan Pengajuan kredit pada Industri Tahu "CNG"

Industri ini mengetahui informasi kredit untuk usaha kecil adalah dari salah satu kerabatnya yang bekerja pada suatu BPR. Karena industri ini merasa membutuhkan modal tambahan dalam usahanya, maka industri ini mencari informasi tentang penyaluran kredit dari BPR. Persyaratan yang ditetapkan oleh BPR sedikit terdapat kendala bagi industri dalam memenuhinya, hanya saja dokumen yang harus dipenuhi tidak dapat sekaligus dipenuhi (PBB sertifikat tanah tidak dibayar) sehingga waktu pemberian kredit juga makin lama terealisasi. Dalam melunasi PBB sertifikat tanah yang harus dilunasi pihak industri kepada instansi terkait membutuhkan waktu selama 2 minggu.

Setelah dokumen lengkap dan BPR menganalisis usaha industri ini, BPR memberitahukan bahwa kredit yang diajukan dapat diterima dan akan diberikan setelah perjanjian kredit disepakati. Jumlah kredit yang didapatkan usaha ini sama dengan jumlah kredit yang diajukan sebelumnya.

b Gambaran Pelaksanaan Pengajuan Kredit pada Industri tahu "A.B"

Industri ini mengajukan kredit dengan tujuan ingin menambah produksinya untuk memperluas pemasaran. Dalam proses pengajuan kredit, industri ini tidak

mengalami kendala apapun sehingga pencairan kredit pun bisa lebih cepat direalisasikan yaitu selama 7 hari. Jumlah kredit yang diberikan BPR dengan jumlah kredit yang diajukan industri ini sama.

c. Gambaran Pelaksanaan Pengajuan Kredit pada industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"

Pada persyaratan awal industri ini hanya memberikan agunan berupa foto copy sertifikat tanah dan tentu saja BPR menolak persyaratan awal dari industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E" ini. Setelah persyaratan awal dipenuhi, BPR melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen dan melakukan wawancara langsung. Berdasarkan informasi yang telah diketahui dan didapatkan oleh BPR, industri ini diberi tahu bahwa industrinya dapat menerima kredit tetapi setelah perjanjian yang ditetapkan BPR dapat disepakati bersama. Akhirnya, industri ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama menerima kredit dari BPR yaitu selama 15 hari dan jumlah kredit yang didapatkan usaha ini sama dengan jumlah kredit yang diajukan.

4.2.3.3 Pelaksanaan Pengembalian Kredit yang Dijalankan oleh IKM

Setelah kredit diberikan pada IKM pengolahan hasil pertanian, maka industri memiliki kewajiban (tanggung jawab) untuk membayar angsuran kredit sampai lunas sampai jangka waktu yang telah disepakati. Dari wawancara dengan responden, pengembalian kredit yang dilakukan dari tiga industri yaitu Industri tahu "CNG", Industri tahu "A.B" dan Industri bubuk kedelai/jahe "M.B.E" sudah membayar lunas kredit dan pembayaran pun sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh BPR. Jika terjadi keterlambatan pembayaran setiap bulannya, industri akan diberikan sanksi sesuai hari yang dinyatakan telah mengalami keterlambatan dari waktu yang semestinya. Sanksi dari keterlambatan pembayaran yang didapatkan industri ini berupa denda. Selama proses pengembalian angsuran berlangsung, ketiga industri mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak BPR. Pengawasan yang dialami ketiga industri ini hampir sama yaitu peninjauan ke lokasi industri, *contact person* dan melihat laporan catatan keuangan yang dibuat oleh industri. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh pihak BPR pada ketiga industri

tersebut umumnya adalah membantu industri ini dalam membuat laporan keuangan dan konsultasi masalah usaha yang sedang dijalankan.

Dari wawancara dengan pihak industri sampel yaitu yaitu Industri tahu "CNG", Industri tahu "A.B" dan Industri bubuk kedelai/jahe "M.B.E" proses pengambilan kredit berjalan dengan lancar, hanya saja terkendala sewaktu proses pengajuan karena kurangnya persyaratan yang diberikan oleh pihak industri sehingga memerlukan waktu yang agak lama.

4.2.4 Kredit Yang diterima IKM Pengolahan Hasil Pertanian

a. Jumlah Kredit Yang diterima

Jumlah kredit yang diajukan dengan jumlah kredit yang diberikan oleh BPR ditentukan berdasarkan analisis keuangan yang dilakukan oleh pihak BPR yang menangani kredit untuk IKM. Faktor utama yang akan menentukan besarnya tingkat peminjaman dari responden adalah jumlah pendapatannya. Mereka merasa perlu meminjam kredit untuk menunjang usahanya karena pendapatan yang mereka dapatkan belum cukup untuk memenuhi segala aktifitas usaha yang mereka jalankan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Humaidi (2006), bahwa pada saat masyarakat tidak mempunyai pendapatan yang maksimal, mereka akan membiayai produksi mereka dengan melakukan peminjaman / kredit.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah kredit tertinggi yang diterima nasabah sampel/responden adalah sebesar Rp. 20.000.000,-. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kredit yang diajukan dengan jumlah kredit yang diterima oleh responden dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Kredit yang Diajukan dengan Jumlah Kredit yang Diterima Responden pada tahun 2008.

No	Jenis Usaha	Alamat	Jumlah kredit yang diajukan (Rp)	Jumlah kredit yang diterima (Rp)
1	Industri Roti/Kue	Jl. Batang Lembang Kel. VI Suku Kota Solok	5.000.000	5.000.000
2	Industri Tahu "CNG"	Jl. Sersan Basir Gawan RT/RW 01/04 Kel. Tanah Garam	20.000.000	20.000.000
3	Industri Bubuk Kedelai, Jahe	Jl. Reformasi No.15 RT/RW 02/03 Kel. Simp Rumbio Solok	10.000.000	10.000.000
4	Industri Tahu "A.B"	Jl. Prof Dr Hamka No.28 Lkah Pandan Kel. KTK	10,000,000	10.000.000
Total			45.000.000	45.000.000

Dari Tabel 7 terlihat bahwa pada masing-masing industri tersebut mendapatkan pinjaman kredit sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan. Jumlah pinjaman yang diterima oleh industri berkisar antara Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp 20.000.000. Dari hasil penelitian, pada mulanya semua industri tersebut mengalami kesulitan dalam meminjam kredit, ini dikarenakan pihak BPR tidak mengetahui jenis usaha yang dijalankan oleh industri berjalan dengan baik atau tidak.

b. Jaminan yang diajukan, jangka waktu peminjaman, dan jumlah angsuran kredit

Jaminan yang diberikan industri kepada BPR akan ditangguhkan sementara waktu sampai akhir pelunasan kredit agar nantinya kredit yang diberikan mengalami kemacetan / nasabah tidak membayar angsuran kredit, maka jaminan dapat digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh BPR. Jaminan yang diberikan harus disesuaikan dengan jumlah kredit yang akan diberikan oleh BPR. Jangka waktu peminjaman dan jumlah angsuran yang akan dijalankan calon nasabah boleh ditentukan nasabah itu sendiri tetapi sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh

BPR. Waktu peminjaman, jaminan, jangka waktu peminjaman industri yang menerima kredit dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Waktu Peminjaman, Jaminan dan Jangka Waktu Peminjaman.

No	Industri	Waktu peminjaman	Jaminan yang diberikan	Jangka waktu peminjaman	Jumlah Angsuran Kredit/ bln (Rp)
1.	Industri tahu "CNG"	Januari 2008	Sertifikat Tanah	24 bulan	Rp 833.333
2.	Industri tahu "A.B"	Maret 2008	Sertifikat Tanah	12 bulan	Rp. 833.333
3.	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	Januari 2008	Sertifikat Tanah	24 bulan	Rp. 416.666

Pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa jaminan yang diberikan dari ketiga industri tersebut adalah sama, dimana yang menjadi jaminan yang diberikan masing-masing industri kepada BPR adalah Sertifikat tanah. Pada industri tahu "CNG" menetapkan jangka waktu peminjaman selama 24 bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp833.333/bln, industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E" menetapkan jangka waktu peminjaman 24 bulan dengan angsuran Rp 416.666/bln dan industri tahu "A.B" menetapkan jangka waktu 18 bulan dengan angsuran Rp 833.333/bln. Lamanya penetapan jangka waktu peminjaman di tentukan oleh industri yang bersangkutan dengan pertimbangan apakah pendapatan keuntungan yang diperoleh industri tersebut nantinya dapat melunasi pinjaman kredit dari BPR.

c. Lamanya Proses Pencairan Kredit

Lamanya proses pengajuan kredit sampai pada pencairan kredit pada masing-masing industri berbeda-beda, tergantung kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh Industri. Umumnya BPR tidak terlalu lama dalam memberikan kredit yaitu 7- 15 hari. Sebelum kredit dicairkan, BPR melakukan analisis sebaik-baiknya agar kredit yang sudah diberikan tidak disalah gunakan. Adapun yang mempengaruhi lama atau

tidaknya proses pencairan kredit adalah kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kredit yang harus dipenuhi oleh Industri. Jika persyaratan dengan cepat dilengkapi, maka dalam proses analisis dan pencairan kredit juga akan lebih cepat. Lama proses pengajuan kredit sampai kredit dicairkan oleh pihak BPR pada responden dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Lama Proses Pencairan Kredit dan Alasan-Alasannya.

No	Industri	Lama proses pencairan kredit	Alasan
1.	Industri Tahu "CNG"	2 bulan	Dokumen yang diminta belum lengkap karena PBB sertifikat tanah belum dibayar sehingga analisis kredit dan pencairan kredit lebih lama.
2.	Industri Tahu "A.B"	7 hari	Untuk melengkapi dokumen tidak mengalami kesulitan, sehingga pencairan kredit tidak terlalu lama.
3.	Industri Bubuk Kedelai & Jahe "M.B.E"	15 hari	Adanya beberapa dokumen yang belum lengkap sewaktu memenuhi persyaratan awal yakni hanya memberikan foto copy sertifikat tanah

Dari tabel 9 dapat dilihat lamanya proses pencairan kredit dari ketiga responden berbeda-beda, hasil wawancara dengan pihak BPR tentang proses pencairan kredit, dalam pihak BPR itu sendiri adanya pekerjaan yang rangkap dimana satu orang pegawai BPR bisa saja mengerjakan dua pekerjaan di bidang yang berbeda sekaligus. Tetapi pihak BPR selalu mencairkan kredit sesuai dengan jumlah pengajuan kredit yang di minta oleh industri jika seluruh kelengkapan persyaratan dan prosedur pengajuan kredit dari nasabah, jika semua persyaratan belum sepenuhnya dapat dipenuhi, maka analisis kredit dan pencairan kredit belum bisa dilaksanakan oleh pihak BPR. Proses pencairan kredit yang paling cepat dialami oleh industri tahu "A.B" karena kelengkapan dokumen sudah sesuai. Sedangkan proses pencairan kredit yang paling lama dari responden diatas adalah industri tahu "CNG" dikarenakan persyaratan dokumen yang diminta oleh BPR (PBB sertifikat tanah)

belum lengkap, sehingga berdampak juga pada penundaan proses penganalisaan dari pihak BPR.

d. Pemanfaatan Kredit

Kredit yang diberikan oleh BPR harus dimanfaatkan oleh IKM terkait dengan pengembangan usahanya, kredit akan dinilai bermanfaat apabila penggunaan kredit tersebut digunakan sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh usaha agar dapat berkembang dan memperluas pemasarannya. Diantaranya, kredit tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku dan alat penunjang aktifitas produksi agar jumlahnya meningkat dan lebih menefisiensikan proses produksi yang akan dijalankan. Selain itu kredit juga dapat digunakan untuk menambah fasilitas atau sarana tempat produksi berlangsung dan tempat pemasaran hasil produksi agar lebih memadai dan memperluas pemasaran.

Tabel 10. Alokasi Penggunaan Kredit yang Diberikan pada PT.BPR

No.	Industri	Kegunaan Kredit (%)
1.	Industri Tahu "CNG"	50,32 % untuk penambahan biaya proses produksi (yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya solar, biaya kayu bakar, biaya cuka, biaya plastik, biaya air, biaya listrik, biaya penyusutan peralatan, dan PBB) dan 49,68 % lagi masuk kas industri.
2.	Industri Tahu "A.B"	50,58 % untuk penambahan biaya proses produksi (yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya solar, biaya kayu bakar, biaya cuka, biaya plastik, biaya air, biaya listrik, biaya penyusutan peralatan, dan PBB) dan 49,42% lagi masuk kas industri
3.	Industri Bubuk kedelai dan jahe "M.B.E"	19,24 % untuk penambahan biaya proses produksi (yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya solar, biaya kayu bakar, biaya cuka, biaya plastik, biaya air, biaya listrik, biaya penyusutan peralatan, dan PBB) dan 80,58% di masukan ke kas industri

Pada tabel 10 dapat dilihat bahwa alokasi penggunaan kredit yang dilakukan oleh IKM pengolahan hasil pertanian yang meminjam kredit pada PT.BPR Solok Sakato. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari lampiran 19 tentang persentase total

penggunaan pinjaman dalam proses produksi. Kredit menjadi tidak bermanfaat apabila kredit tersebut digunakan diluar ruang lingkup pengembangan usaha. Contohnya seperti kebutuhan konsumtif yang akan mengakibatkan gagalnya usaha. Oleh sebab itu, sebagian besar BPR selalu mengawasi penggunaan kredit agar tidak terjadi penyalahgunaan kredit.

4.3. Kesesuaian Pelaksanaan Prosedur Pengajuan dan Pengembalian Kredit yang Ditetapkan PT.BPR dengan pelaksanaan yang Dijalankan IKM.

Pemberian kredit oleh BPR kepada responden (IKM) di Kota Solok dapat terlaksana jika persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pihak BPR dapat dipenuhi oleh responden (IKM) tersebut. Dalam pelaksanaannya, prosedur kredit melalui beberapa tahapan. Pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pihak BPR belum tentu sesuai dengan apa yang telah dijalankan oleh industri. Pelaksanaan akan berjalan baik apabila kedua belah pihak yaitu BPR dan industri yang menerima kredit dapat menjalankan ketentuan yang telah ada agar proses kredit hingga dinyatakan selesai tidak akan mengalami hambatan. Pelaksanaan ketepatan prosedur pengajuan dan pengembalian kredit yang diberikan BPR dengan yang dijalankan oleh responden dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Pelaksanaan Prosedur Pengajuan dan Pengembalian Kredit oleh BPR dengan IKM Pengolahan Hasil Pertanian di Kota Solok.

No	Indikator	Pelaksanaan oleh BPR	Pelaksanaan oleh IKM	Penilaian
1.	Syarat permohonan kredit	Melampirkan surat permohonan resmi, aplikasi kredit, dan perjanjian kredit	Ada, tetapi masih ada yang belum jelas dan tidak terlalu lengkap	Tidak sesuai
2.	Penilaian kredit	Analisis kredit dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen yang diminta, analisis dengan metode 5 C (<i>character, capital, capacity, condition of economy, collatera.</i>) dengan wawancara langsung dan survey ke lokasi usaha	Pada saat mengajukan permohonan kredit, pihak BPR melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, melakukan wawancara, dan peninjauan ke lokasi usaha	Sesuai

3.	Perjanjian kredit	Setelah kredit disetujui, pihak BPR mengutus notaris untuk membahas berbagai ketentuan yang harus disepakati dalam perjanjian kredit	Pihak BPR bersama notaris menjelaskan isi perjanjian kredit yang harus disepakati	Sesuai
4.	Penetapan jumlah kredit	Kredit yang diberikan ditetapkan berdasarkan kebutuhan usaha dan jaminan yang diajukan	Jumlah kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha dan disesuaikan dengan jaminan.	Sesuai
5.	Lama proses pencairan kredit	1 s/d 2 minggu	7 hari, 15 hari, 60 hari	Tidak sesuai
6.	Pengembalian Kredit	12 s/d 48 bulan	12 s/d 24 bulan	Sesuai
7.	Pengawasan kredit	Dilakukan pengawasan setiap 3 bulan / 6 bulan	Pengawasan dilakukan tidak rutin karena Kurangnya kendaraan dinas Kususnya mobil untuk meninjau nasabah yang domisilinya cukup jauh dari BPR	Tidak sesuai
8.	Sanksi	Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka nasabah akan diberikan denda dan peringatan dari BPR	Sanksi berupa denda dan peringatan dari BPR	Sesuai
9.	Pembinaan	Pembinaan berupa pembuatan laporan keuangan, konsultasi masalah keuangan dan kondisi usaha serta strategi dalam menjalankan bisnis/ usaha	Membantu pembuatan laporan keuangan, konsultasi masalah usaha yang dijalankan	Sesuai
10.	Pemanfaatan kredit	Kredit yang diberikan BPR harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang terkait untuk pengembangan usahanya	Kredit digunakan untuk pengembangan usaha seperti pembelian bahan baku dan alat-alat penunjang aktifitas produksi	Sesuai

1. Kesesuaian tentang Syarat Permohonan Kredit

Didalam persyaratan dan prosedur pengajuan kredit, beberapa responden masih menghadapi kendala ketidak lengkapan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPR, sering kali pihak BPR menemukan agunan yang diberikan calon nasabah berupa sertifikat rumah dimana

sertifikat tanah tersebut pajaknya tidak dibayar oleh sipemilik. Hal ini tentu saja mempengaruhi proses persetujuan kredit.

2. Kesesuaian tentang Penilaian Kredit

Penilaian terhadap proposal permohonan kredit yang diajukan, dilakukan oleh penyedia kredit. Selain kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi, penyelia kredit juga harus mampu menilai calon nasabah dari aspek 5 C (*character, capital, capacity, condition of economy, collatera.*). Aspek ini sangat berguna untuk pihak BPR agar kredit yang akan diberikan benar-benar digunakan untuk usaha/bisnis yang dijalankan responden. Penilaian kredit ini juga dapat melihat apakah responden yang akan diberikan kredit dapat dipercaya untuk menjalankan perjanjian yang harus disepakati. Penilaian dengan melakukan survey ke lokasi industri juga membantu pihak BPR untuk mengetahui keadaan/kondisi usaha yang telah dijalankan sebelum kredit diberikan. Dari peninjauan industri, akan didapat informasi yang jelas mengenai aktifitas usaha yang dijalankan dan lebih mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dikembangkan dari aspek lingkungan, sosial masyarakat, kebutuhan konsumen dan lainnya.

3. Kesesuaian tentang Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit memuat ketentuan-ketentuan pemberian kredit yaitu jumlah pinjaman, jangka waktu peminjaman, bunga yang harus dibayar/bagi hasil yang harus disepakati, tujuan penggunaan kredit, jaminan dan persyaratan lain yang akan menjadi dasar penyusunan perjanjian kredit/akad kredit yang dibuat dihadapan notaris yang telah ditunjuk. Pada ketiga industri responden yang meminjam kredit pada PT.BPR Solok Sakato (industri tahu "CNG", industri tahu "A.B" dan industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E") telah menjalankan perjanjian kredit sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak dimana jumlah peminjaman berkisar antara Rp 5.000.000 sampai Rp 20.000.000, jangka waktu peminjaman 12 bulan sampai 24 bulan, dan bunga yang harus dibayarkan 20% sampai 21%, serta jaminan berupa sertifikat tanah.

4. Kesesuaian tentang Penetapan Jumlah Kredit

Penetapan jumlah kredit yang diberikan oleh BPR pada responden belum tentu sama dengan jumlah kredit yang akan diterima oleh responden. Hal ini didasarkan pada seberapa besar kebutuhan/kekurangan modal yang dibutuhkan untuk usaha tersebut dan seberapa besar kemampuan nasabah untuk nantinya membayar angsuran yang telah ditetapkan oleh BPR. Tetapi sewaktu wawancara dengan pihak BPR, sebagian besar nasabah yang meminjam kredit selalu mendapatkan pinjaman kreditnya sesuai dengan jumlah pengajuan yang dilakukan nasabah. Pada industri sampel yang meminjam di PT.BPR Solok Sakato juga menerima kredit sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh industri tersebut, dimana industri tahu "CNG" menerima pinjaman sebesar Rp 20.000.000, industri tahu "A.B" menerima pinjaman sebesar Rp 10.000.000, dan industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E" menerima pinjaman sebesar Rp 10.000.000.

5. Kesesuaian tentang Lamanya Proses Pencairan Kredit

Proses pencairan kredit biasanya dapat direalisasikan 1 minggu sesudah pengajuan kredit atau paling lambat 2 minggu setelah pengajuan kredit. tetapi dari wawancara langsung dengan industri yang meminjam kredit, ada salah satu dari industri sampel yaitu industri tahu "CNG" dimana pengajuan kreditnya baru dicairkan pihak BPR kurang lebih selama 2 bulan. Hal ini disebabkan karena industri tersebut memberikan agunan berupa sertifikat tanah yang pajaknya belum dibayarkan oleh si pemilik serta pihak BPR membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menganalisis usaha responden karena di dalam BPR itu sendiri adanya pekerjaan yang rangkap. Artinya, satu orang pegawai BPR bisa saja mengerjakan dua pekerjaan di bidang yang berbeda sekaligus.

6. Kesesuaian tentang Pengembalian Kredit

Pengembalian kredit yang dilakukan oleh ketiga industri sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh BPR. Jika terjadi keterlambatan pembayaran setiap bulannya, industri akan diberikan sanksi sesuai hari yang dinyatakan telah mengalami keterlambatan dari waktu yang semestinya. Sanksi dari keterlambatan pembayaran yang didapatkan industri ini berupa denda. Selama proses

pengembalian angsuran berlangsung, ketiga industri responden yaitu industri tahu "CNG", industri tahu "A.B", dan industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E" mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak PT.BPR selama masih menjadi nasabah PT.BPR Solok Sakato.

7. Kesesuaian tentang Pengawasan Kredit

Pengawasan setelah kredit cair dilakukan minimal setiap 3 bulan, tetapi pada kenyataannya dilapangan, pengawasan sering kali dilakukan dengan waktu yang tidak ditetapkan, hal ini disebabkan minimnya transportasi yang dimiliki BPR untuk melakukan pengawasan pada nasabah yang lokasi usahanya agak terpencil / jauh dari kota. Untuk itu, pihak BPR juga melakukan *contact person* untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut mengenai kondisi usaha tersebut.

8. kesesuaian tentang Sanksi

Responden yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit tepat pada jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, maka akan dikenai sanksi berupa denda dan peringatan yang ditetapkan oleh pihak BPR. Biasanya denda yang didapatkan dari keterlambatan nasabah dalam melunasi angsuran kredit akan digunakan untuk kepentingan BPR tersebut.

9. Kesesuaian tentang Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak BPR BPR responden diantaranya adalah membantu nasabah dalam pembuatan laporan keuangan pada 2 tahun pertama kredit diberikan, selain itu BPR juga berkonsultasi dengan responden tentang kondisi usaha dan strategi apa yang harus dijalankan dalam mengembangkan usaha agar tidak terjadi kerugian bagi usaha yang nantinya juga akan berdampak pada lancar atau tidaknya kredit yang akan dilunasi oleh nasabah.

10. Kesesuaian tentang Pemanfaatan Kredit

Kesesuaian pemanfaatan kredit yang diberikan BPR kepada IKM haruslah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPR, yakni terkait dengan pengembangan usahanya. Kredit akan dinilai bermanfaat apabila penggunaan kredit tersebut digunakan sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh usaha agar dapat berkembang dan memperluas pemasarannya. Kredit tersebut digunakan untuk

pembelian bahan baku dan alat penunjang aktifitas produksi agar jumlahnya meningkat dan lebih menefisiensikan proses produksi yang akan dijalankan.

4.4. Identifikasi Alasan-Alasan yang Menyebabkan Responden IKM Masih Sedikit Sekali Meminjam Kredit pada PT. BPR untuk Menunjang Perkembangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga industri yang tidak melakukan pinjaman kredit, umumnya mereka sangat membutuhkan tambahan modal untuk menunjang perkembangan usaha mereka, tetapi karena berbagai alasan yang menyangkut banyak hal yang menyebabkan mereka mengurungkan niat untuk mengajukan kredit membuat ketiga industri tersebut cukup lama mempertimbangkan /memutuskan apakah dapat memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan bank untuk mendapatkan dan memanfaatkan kredit bagi tambahan modal usaha mereka. Adapun Tanggapan responden yang tidak menjadi nasabah kredit PT. BPR dilihat dari aspek Pengetahuan umum tentang BPR, Pelayanan di BPR, Manfaat bank, dan Informasi kredit di BPR dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Tanggapan responden yang tidak menjadi nasabah kredit PT. BPR dilihat dari aspek Pengetahuan umum tentang BPR, Pelayanan di BPR, Manfaat bank, dan Informasi kredit di BPR.

No	Indikator	Tanggapan IKM yang tidak meminjam pada PT.BPR Solok Sakato (Responden)	Frekuensi Tanggapan Responden (Unit)	Persentase (%)
1.	Pengetahuan umum tentang BPR	IKM telah mengenal BPR sudah sejak lama tetapi pada umumnya IKM hanya mengetahui BPR tersebut dari orang yang pernah meminjam di BPR.	3	75
2.	Pelayanan di BPR	Tidak mengetahui seperti apa pelayanan di BPR karena IKM belum pernah meminjam di BPR	3	75
3.	Manfaat BPR	Hadirnya BPR dirasa bisa memberi manfaat bagi IKM karena BPR bisa sebagai tempat simpan pinjam uang.	3	75
4.	Informasi kredit di BPR	IKM tidak mengetahui dengan jelas informasi kredit di BPR, IKM hanya mengetahui informasi kredit tersebut dari mulut ke mulut atau kerabat	3	75

Pada tabel 12 dapat dilihat bahwa ketiga industri yang tidak meminjam di PT.BPR Solok Sakato seluruhnya memberikan tanggapan bahwa IKM tersebut hanya mengetahui/mengenal BPR dari orang yang pernah meminjam di BPR karena mereka tidak lebih lanjut mencari tahu informasi tentang kredit dan mendengar berbagai informasi tentang prosedur kredit yang rumit sehingga industri tersebut tidak ingin mengajukan kredit untuk tambahan modal dalam mengembangkan usahanya.

Dari segi manfaat, hadirnya BPR sebagai lembaga simpan pinjam dirasa dapat memberikan pemikiran positif bagi ketiga industri ini. Namun, pada umumnya responden merasa berat dan berbelit-belit dengan persyaratan administrasi yang di terapkan oleh BPR terutama pada proses pengajuan kredit dan syarat permohonan kredit. Beberapa alasan yang menyebabkan responden tidak memanfaatkan kredit untuk menunjang modal dalam usahanya dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Alasan-Alasan yang Menyebabkan Responden Tidak Pernah Meminjam Kredit dari BPR.

No.	Industri	Alasan- alasan
1.	Industri Tahu "Puteri Tunggal (PT)"	- Bunga yang tinggi - Jaminan yang besar - Proses Pencairan Kredit Lama
2.	Industri Tahu "Sumber Gizi Utama (SGU)"	- Tidak tahu cara pengajuan kredit - Jaminan yang besar - Bunga yang tinggi
3.	Industri Bubuk Kedelai "INSTAN"	- Tidak tahu jelas tentang informasi kredit di BPR

1. Industri Tahu "Puteri Tunggal (PT)"

Industri Tahu "Puteri Tunggal (PT)" dulunya pernah meminjam pada salah satu BPR di Kota Solok, berdasarkan pengalaman yang dialami oleh industri tahu "Puteri Tunggal (PT)" tersebut dalam mengajukan permohonan kredit, industri ini terkendala dengan berbagai dokumen-dokumen yang ditetapkan oleh pihak BPR sebagai persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan kredit. Hambatan yang

dihadapi diantaranya adalah laporan keuangan karena industri tahu ini dulunya tidak begitu memperhatikan laporan keuangan, surat resmi permohonan kredit, dokumen lain yang berhubungan dengan izin-izin usaha yang dijalankan. Hal ini menyebabkan usaha ini enggan meminjam kredit kembali karena prosedur cukup rumit dan waktu yang dibutuhkan relatif lama.

2. Industri Tahu “Sumber Gizi Utama (SGU)”

Kendala yang dihadapi oleh Industri Tahu “Sumber Gizi Utama (SGU)” dalam meminjam kredit adalah tidak mengetahui cara pengajuan kredit di BPR karena banyaknya prosedur yang harus di penuhi. Disamping itu, kendala yang juga dihadapi industri tahu “Sumber Gizi Utama (SGU)” adalah adanya pemberitahuan dari kerabat yang pernah meminjam di BPR mengatakan bahwa proses peminjaman kredit memerlukan waktu yang lama serta membutuhkan jaminan yang cukup besar.

3. Industri Bubuk Kedelai “INSTAN”

Usaha ini merupakan usaha kecil-kecilan dengan segala alat penunjang produksi yang masih sederhana dan tempat usaha yang hanya seadanya di tempat tinggal keluarga. Usaha ini ingin jugs ingin mengembsngksnkan usahanya dan meningkatkan jumlah produksinya lebih besar dengan meminjam kredit pada BPR, tetapi mendengar informasi dari luar bahwa mengajukan kredit untuk usaha harus memiliki jaminan yang cukup besar dan kewajiban membayar angsuran dan bunga tiap bulannya sehingga membuat usaha ini tidak berani mengajukan kredit karena merasa takut tidak dapat menyanggupi kewajiban membayar angsuran dan bunga jika tiba-tiba terjadi penurunan penjualan.

Dari hasil penjelasan industri (responden) tentang alasan-alasan yang menyebabkan industri tidak memanfaatkan kredit, akan diketahui apa sebenarnya yang menjadi masalah paling dominan yang dirasakan industri sehingga industri tersebut masih sedikit sekali meminjam di BPR untuk pengembangan usahanya. Adapun identifikasi persentase alasan dari ketujuh industri yang paling dominan terkait masalah sedikitnya industri pengolahan hasil pertanian yang meminjam di BPR akan diketahui dari persentase alasan yang tertera pada Tabel 14.

Tabel 14. Persentase Alasan Industri yang Paling Dominan yang Menyebabkan Industri Masih Sedikit Sekali Meminjam Kredit di PT.BPR.

No	Alasan – Alasan	Frekuensi Tanggapan Responden (Unit)	Presentase (%)
1.	membutuhkan proses yang lama	1	25,00 %
2.	Jaminan yang besar	2	50,00 %
3.	Bunga yang tinggi	2	50,00 %
4.	Tidak tahu informasi dan cara pengajuan kredit	2	50,00 %

Berdasarkan Tabel 14, dapat dilihat frekuensi alasan/tanggapan dari responden yang tidak memanfaatkan kredit. Alasan tersebut adalah bunga BPR yang tinggi dengan presentase 28,57 %. Alasan tentang bunga yang tinggi ini merupakan jawaban yang dikemukakan oleh 2 dari 3 industri yang menjadi responden, karena dengan adanya bunga yang tinggi, industri merasa takut untuk mengajukan kredit karena pembayaran angsuran kredit akan disertai pembayaran bunga yang tinggi. hal ini senada dengan yang ditemukan Donna (2005), yaitu faktor suku bunga ternyata juga berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk meminjam. Masyarakat masih cenderung memperhatikan suku bunga dalam meminjam kredit di BPR.

Selain itu, 2 dari 3 industri juga mengatakan jaminan yang besar dan tidak tahu informasi dan cara pengajuan kredit juga merupakan faktor kenapa IKM masih sedikit sekali meminjam di BPR, yaitu dengan persentase 28,57 %. Sama halnya dengan yang ditemukan oleh Donna (2005), bahwa masalah yang muncul dari jaminan yang akan diberikan apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan BPR / diakui oleh pihak BPR. Misalkan agunan berupa surat sertifikat tanah, BPKB kendaraan Bermotor belum tentu di anggap sesuai oleh pihak perBPRan untuk pemberian sejumlah kredit. Jadi terdapat perbedaan persepsi mengenai definisi agunan/ jaminan antara BPR dengan calon nasabah dan Suryadharma (2006), bahwa aturan dan prosedur yang berbelit-belit akan menghambat IKM dalam mendapatkan kredit selain SDM mereka yang masih rendah.

Persentase alasan terkecil kenapa industri masih sedikit sekali meminjam di BPR adalah membutuhkan waktu yang lama dalam pencairan kredit sehingga industri belum memanfaatkan pinjaman kredit dari BPR. Jumlah persentasenya adalah 14,28%.

4.5. Perkembangan Industri yang Menerima Kredit dari PT.BPR

4.5.1. Perkembangan Volume Produksi dan Penjualan Usaha yang Menerima Kredit

Perkembangan suatu industri harus diikuti dengan peningkatan volume produksi yang akan dihasilkan industri tersebut. Terjadinya peningkatan volume produksi akan mempengaruhi keuntungan dan luas daerah penjualan produk tersebut. Salah satu penyebab industri mengalami penurunan volume produksi dapat diakibatkan karena kurangnya modal yang dimiliki industri tersebut untuk pembelian bahan baku produksi. Perkembangan volume produksi industri yang meminjam kredit pada BPR dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Perkembangan Volume Produksi dan Penjualan Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit

No	Industri	Satuan	Sebelum menerima kredit (2007)	Sesudah menerima kredit (2008)	Perkembangan produksi	Presentase perkembangan (%)
1.	Industri Tahu "CNG"	Kg	1200	1500	300	25
2.	Industri Tahu "A.B"	Kg	500	800	300	60
3.	Idustri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	Kg	100	150	50	50
Jumlah				1.550	350	
Rata-rata				516,67	116,67	

Pada Tabel 15 dapat dilihat persentase perkembangan rata-rata ketiga industri ini cukup tinggi. Setelah adanya tambahan modal dari BPR, umumnya industri memprioritaskan penggunaan kredit tersebut untuk pembelian bahan baku, sehingga produksi dapat terus meningkat dan tetap berjalan dengan persediaan bahan baku yang ada. Pada tabel ini terlihat peningkatan perkembangan volume produksi usaha sebelum dan sesudah meminjam kredit pada PT.BPR Solok Sakato dimana peningkatan produksi ini di dorong oleh keinginan pemilik usaha untuk mendapatkan peningkatan keuntungan serta kapasitas kerja mesin yang masih menampung dengan kenaikan persentase volume produksi seperti sekarang ini. Industri yang mengalami peningkatan volume produksi paling tinggi adalah pada industri tahu "AB" dan industri tahu "M.B.E". dimana nilai masing-masingnya sebesar 60% dan 50%, peningkatan volume produksi yang tinggi ini terjadi setelah industri ini menerima kredit dari BPR yang pengalokasian kreditnya digunakan untuk pembelian bahan baku dan pembelian mesin untuk produksi. Sedangkan perkembangan persentase terendah dari ketiga industri yang meminjam kredit pada BPR adalah industri tahu "CNG". Walaupun industri tahu "CNG" ini persentase perkembangan jumlah produksinya paling sedikit bukan berarti industri ini tidak mengalami peningkatan produksi setelah meminjam di BPR, peningkatan jumlah produksi industri ini setelah meminjam di BPR adalah sebesar 25%.

4.5.2 Perkembangan Daerah Pemasaran Industri Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit di BPR.

Perkembangan daerah pemasaran industri ini juga semakin meningkat setelah mendapatkan kredit dari BPR. Hal ini juga berkaitan dengan semakin meningkatnya volume produksi dari masing-masing industri. Pemasaran produksi industri ini juga sampai ke luar daerah Sumtara Barat seperti yang terlihat pada tabel 16.

Tabel 16. Perkembangan daerah pemasaran industri sebelum dan sesudah mendapatkan kredit

No	Industri	Daerah Pemasaran Sebelum menerima kredit	Daerah Pemasaran Sesudah menerima kredit	Perkembangan Daerah Pemasaran
1.	Industri Tahu "CNG"	Balai-balai di Kota Solok, Pdg.Panjang, Teluk Kontan, sijunjung	Balai-balai di Kota Solok, Pdg.Panjang, Tanjung Ampadu, Sijunjung.	Sijunjung dan Padang Panjang
2.	Industri Tahu "A.B"	Pasar Solok, ke balai-balai (Sumani, Muaro Paneh, Cupak, Bukik Sileh, Sulik aia).	Pasar Solok, ke balai-balai (Sumani, Muaro Paneh, Cupak, Bukik Sileh, Sulik aia), Sawahlunto	Sawahlunto
3.	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	Toko-toko di Pasar Kota Solok dan Padang.	Toko-toko di Pasar Kota Solok, Pekan Baru, Medan.	Pekan Baru, Medan

Dari tabel 16 terdapat perkembangan pemasaran masing-masing industri dimana setelah mendapatkan pinjaman kredit dari BPR industri tersebut mampu memproduksi produk lebih banyak dan meningkatkan daerah pemasarannya. Pada industri tahu "CNG" dapat dilihat pada tabel bahwa daerah pemasaran produknya setelah mendapatkan peminjaman kredit sudah sampai ke Sijunjung dan Padang Panjang dengan jumlah pengiriman sebanyak 180 papan/hari dengan biaya Rp 1.262.500, sedangkan industri tahu "A.B" yang dulunya tempat pemasaran produknya hanya ke balai-balai disekitar Kab.Solok sekarang hasil produknya sudah sampai di Kab.Sawahlunto dengan jumlah pengiriman sebanyak 96 papan/hari dengan biaya Rp 1.155.000, dan industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E" hasil produknya sudah di pasarkan ke Pekan Baru dan Medan dengan biaya Rp 242.000 (Lampiran 17).

4.5.3. Penggunaan Tenaga Kerja Industri Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit di BPR.

Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan suatu industri untuk membantu proses produksi harus sesuai dengan kebutuhan industri untuk menjalankan usaha agar lebih efektif. Biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja biasanya akan diputuskan oleh industri tersebut baik sesuai UMR maupun sesuai dengan pendapatan yang akan didapatkannya. Perkembangan jumlah tenaga kerja industri yang meminjam kredit pada BPR dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Perkembangan Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit

No	Industri	Sebelum Menerima kredit			Sesudah menerima kredit		
		Jml TK (org)	Biaya TK (Rp)	Total Biaya TK (Rp)	Jml TK (org)	Biaya TK (Rp)	Total Biaya TK (Rp)
1.	Industri Tahu "CNG"	17	55.000	935.000	20	55.000	1.100.000
2.	Industri Tahu "A.B"	4	55.000	220.000	6	55.000	330.000
3.	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	3	50.000	150.000	5	50.000	250.000
Jumlah		24	140.000	1.305.000	31	160.000	1.680.000
Rata-rata		9,33	46.666,67	435.000	12,33	53.333,33	560.000

Pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa tiap industri mengalami kenaikan tenaga kerja sehingga menyebabkan kenaikan biaya tenaga kerja. Perkembangan total biaya tenaga kerja paling tinggi yaitu pada industri tahu "CNG" sedangkan perkembangan tenaga kerja yang paling rendah adalah pada industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E".

4.5.4. Perkembangan Tingkat Keuntungan Industri Sebelum dan Sesudah Meminjam Kredit di BPR.

Tingkat keuntungan dari masing-masing Industri yang meminjam kredit pada BPR Solok sakato juga meningkat dari sebelum mereka mendapatkan pinjaman kredit. Hal ini juga menggambarkan bahwa kredit yang diberikan oleh BPR Solok Sakato sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap perkembangan industri tersebut.

4.5.4.1 Penerimaan

Penerimaan merupakan nilai yang diterima industri dari hasil penjualan usahanya. Penerimaan diperoleh dari banyaknya hasil produksi dikalikan dengan harga jual. Dari hasil penelitian didapatkan penerimaan masing-masing industri sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari BPR Solok Sakato adalah seperti pada tabel 18 dan 19.

Tabel 18. Penerimaan masing-masing industri sebelum mendapatkan kredit

No	Industri	Produksi / Papan atau bks	Harga Jual (Rp)	Penerimaan (Rp)
1	Industri Tahu "CNG"	288	34.000	9.792.000
2	Industri Tahu "A.B"	120	34.000	4.080.000
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"			
	- Bubuk Kedelai	200	9.000	1.800.000
	- Jahe Murni	175	6.000	1.050.000
	- Bubuk Jahe Rasa Cokelat	125	10.000	1.250.000

Tabel 19. Penerimaan masing-masing industri sesudah mendapatkan kredit

No	Industri	Produksi / Papan atau bks	Harga Jual (Rp)	Penerimaan (Rp)
1	Industri Tahu "CNG"	360	34.000	12.240.000
2	Industri Tahu "A.B"	192	34.000	6.528.000
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"			
	- Bubuk Kedelai	350	9.000	3.150.000
	- Jahe Murni	200	6.000	1.200.000
	- Bubuk Jahe Rasa Cokelat	200	10.000	2.000.000

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan yang diperoleh tiap-tiap usahanya mengalami peningkatan setelah meminjam di BPR, pada industri tahu "CNG" sebelum meminjam kredit pada BPR memperoleh penerimaan setiap harinya sebesar Rp 9.792.000 dan setelah meminjam industri ini memperoleh penerimaan sebesar 12.240.000. hal ini dikarenakan meningkatnya penjualan jumlah produksi industri dan harga penjualan produk. Begitu juga dengan industri tahu "A.B" dan industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E" yang mengalami peningkatan penerimaan.

4.5.4.2 Biaya-Biaya Produksi

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pihak industri pada saat melakukan usahanya. Biaya-biaya ini berbeda satu sama lainnya. Hal ini tergantung dari jumlah produksi industri tersebut.

4.5.4.2.1 Biaya Bahan Baku

Bedasarkan penelitian didapatkan rata-rata biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh masing-masing industri sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari BPR adalah seperti yang ada pada tabel 20 dibawah ini. Untuk lebih jelasnya, perhitungan biaya bahan baku ini dapat dilihat pada lampiran 8 dan lampiran 9. Tabel 20. Biaya bahan baku yang dikeluarkan industri sebelum meminjam di BPR

Industri	Kedelai (Kg)	Jahe (Kg)	Bubuk Cokelat (Kg)	Harga Kedelai (Rp)	Harga Jahe (Rp)	Harga Bubuk Coklat (Rp)	Total Biaya (Rp)
Industri tahu "CNG"	1200			5.600			6.720.000
Industri tahu "A.B"	500			5.600			2.800.000
Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	40	55	5	5.600	10.000	13.000	839.000

Tabel 21. Biaya bahan baku yang dikeluarkan industri sesudah meminjam di BPR

Industri	Kedelai (Kg)	Jahe (Kg)	Bubuk Cokelat (Kg)	Harga Kedelai (Rp)	Harga Jahe (Rp)	Harga Bubuk Coklat (Rp)	Total Harga (Rp)
Industri tahu "CNG"	1500			5.600			8.400.000
Industri tahu "A.B"	800			5.600			4.480.000
Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	70	70	10	5.600	10.000	13.000	1.409.200

4.5.4.2.2 Biaya Solar

Jumlah penggunaan solar yang dikeluarkan oleh industri juga tergantung dari banyaknya produksi yang dilakukan oleh masing-masing industri. Solar ini digunakan oleh industri sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin dompeng. Dari hasil penelitian di dapatkan biaya solar yang dikeluarkan oleh oleh industri mengalami peningkatan pada kondisi industri sebelum dan sesudah meminjam dikarenakan waktu pemakaian kerja mesin bertambah akibat peningkatan volume produksi seperti yang ditampilkan pada tabel 22 dan 23.

Tabel 22. Biaya solar yang dikeluarkan industri sebelum meminjam di BPR

No	Industri	Penggunaan Solar (Liter)	Harga Solar (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Industri tahu "CNG"	10	4.300	86.000
2	Industri tahu "A.B"	7	4.300	43.000

Tabel 23. Biaya solar yang dikeluarkan industri sesudah meminjam di BPR

No	Industri	Penggunaan Solar (Liter)	Harga Solar (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Industri tahu "CNG"	20	4.300	73.100
2	Industri tahu "A.B"	17	4.300	30.100

4.5.4.2.3 Biaya Kayu Bakar

Kayu bakar digunakan industri untuk memasak kacang kedelai diatas tungku uap. Hal ini dilakukan untuk penghematan biaya produksi. Karena jika menggunakan kompor maka akan mengeluarkan biaya produksi yang lebih banyak lagi. Dari hasil penelitian didapatkan biaya kayu bakar yang dikeluarkan oleh masing-masing industri juga mengalami peningkatan karena penambahan volume produksi sesudah meminjam kredit pada PT.BPR Solok Sakato seperti yang ada pada tabel 24 dan 25.

Tabel 24. Biaya kayu bakar yang dikeluarkan industri sebelum meminjam di BPR

No	Industri	Penggunaan Kayu Bakar (Per unit truk)	Harga Kayu Bakar (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Industri tahu "CNG"	1	125.000	125.000
2	Industri tahu "A.B"	0,5	125.000	62.500
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	0,5	125.000	62.500

Tabel 25. Biaya kayu bakar yang dikeluarkan industri sesudah meminjam di BPR

No	Industri	Penggunaan Kayu Bakar (Per unit truk)	Harga Kayu Bakar (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Industri tahu "CNG"	1,5	125.000	187.500
2	Industri tahu "A.B"	1	125.000	125.000
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	1	125.000	125.000

4.5.4.2.4 Biaya Air

Air bersih amat penting digunakan dalam seluruh proses produksi, baik untuk mencuci, merendam maupun untuk membuat sari kedele. Air ini juga berfungsi pada saat penyaringan sari kedelai yang telah dimasak dengan tungku uap. Hal ini bertujuan untuk memisahkan kedelai dengan sari patinya pada saat penyaringan tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa biaya air per bulannya pada tiap-tiap industri beragam. Pada industri tahu "CNG" biaya air sebelum meminjam kredit di BPR pada tahun 2007 sebesar Rp 250.000/bulan dan setelah meminjam kredit tahun 2008 biaya air meningkat menjadi Rp 300.000/bulan. Sama halnya dengan Industri

tahu "A.B" dan industri bubuk kedelai "M.B.E" dimana biaya air industri tahu "A.B" pada tahun 2007 sebesar Rp 200.000/bulan dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 300.000/bulan, sedangkan industri bubuk kedelai "M.B.E" pada tahun 2007 biaya airnya Rp 100.000/bulan dan pada tahun 2008 sebesar Rp 150.000/bulan. Rata-rata biaya air yang dikeluarkan oleh industri sebelum meminjam di BPR adalah Rp 6.111,11 dan sesudah meminjam di BPR sebesar Rp 8.333,33 (lampiran 12 dan 13).

4.5.4.2.5 Biaya Listrik

Listrik digunakan oleh industri hanya untuk menggerakkan mesin pompa air yang dalam hal proses produksi. Perhitungan biaya listrik ini dilihat dari pemakaian listrik yang digunakan oleh industri perbulannya untuk mesin tersebut. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa Dari hasil penelitian diketahui bahwa biaya listrik per bulannya pada tiap-tiap industri juga beragam. Pada industri tahu "CNG" biaya listrik sebelum meminjam kredit di BPR pada tahun 2007 sebesar Rp 30.000/bulan dan setelah meminjam kredit tahun 2008 biaya listrik meningkat menjadi Rp 40.000/bulan. Sama halnya dengan Industri tahu "A.B" dan industri bubuk kedelai "M.B.E" dimana biaya listrik kedua industri ini adalah sama yaitu pada tahun 2007 sebesar Rp 20.000/bulan dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 30.000/bulan. Rata-rata biaya listrik yang dikeluarkan oleh industri sebelum meminjam di BPR adalah Rp 777,77 dan sesudah meminjam di BPR sebesar Rp 1.555,55 (lampiran 12 dan 13).

4.5.4.2.6 Biaya Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam proses produksi. Tenaga kerja yang dipakai berasal dari tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga dengan sistem upahan. Besarnya upah untuk tenaga kerja ini berkisar antara Rp 50.000 sampai Rp 55.000/orang/hari (Lampiran 8 dan 9). Upah diberikan setiap pekerjaan telah selesai dilakukan. Banyaknya jumlah Tenaga kerja dan upah yang digunakan oleh masing-masing industri dapat dilihat pada tabel 26 dan 27.

Tabel 26. Jumlah Tenaga kerja dan upah yang digunakan oleh industri sebelum mendapat kredit dari BPR

No	Nama Industri	Jumlah Tenaga Kerja (Org)	Biaya Tenaga Kerja
1	Industri Tahu "CNG"	17	Rp 935.000
2	Industri Tahu "A.B"	4	Rp 220.000
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	3	Rp 150.000

Tabel 27. Jumlah Tenaga kerja dan upah yang digunakan oleh industri sesudah mendapat kredit dari BPR

No	Nama Industri	Jumlah Tenaga Kerja (Org)	Biaya Tenaga Kerja
1	Industri Tahu "CNG"	20	Rp 1.100.000
2	Industri Tahu "A.B"	6	Rp 330.000
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	5	Rp 250.000

4.5.4.2.7 Biaya Cuka

Asam cuka digunakan sebagai campuran sari kedelai agar dapat menggumpal menjadi tahu. Banyaknya asam cuka yang digunakan masing-masing industri berbeda satu sama lainnya. Hal ini tergantung dari banyaknya produksi tahu yang akan mereka produksi. Hal ini juga menyebabkan adanya perbedaan biaya asam cuka yang dikeluarkan oleh masing-masing industri.

Dari hasil penelitian didapatkan rata-rata besarnya biaya penggunaan asam cuka yang dikeluarkan oleh industri sebelum meminjam di BPR adalah sebesar Rp 180,82 dan rata-rata besarnya biaya penggunaan asam cuka yang dikeluarkan oleh industri setelah meminjam di BPR adalah sebesar Rp. 281,28/hari (Lampiran 12 dan 13). Besarnya biaya cuka yang dikeluarkan oleh masing-masing industri dapat dilihat pada tabel 29 dan 30.

Tabel 29. Besarnya biaya asam cuka yang dikeluarkan oleh masing-masing industri sebelum meminjam di BPR

No	Industri	Jumlah pemakaian asam cuka per hari	Biaya asam cuka Per hari (Rp)
1	Industri Tahu "CNG"	0,014	301,37
2	Industri Tahu "A.B"	0,011	241,09

Tabel 30. Besarnya biaya asam cuka yang dikeluarkan oleh masing-masing industri setelah meminjam di BPR

No	Industri	Jumlah pemakaian asam cuka per hari	Biaya asam cuka Per hari (Rp)
1	Industri Tahu "CNG"	0,022	482,19
2	Industri Tahu "A.B"	0,016	361,64

4.5.4.2.8 Biaya Plastik

Plastik hanya digunakan oleh industri bubuk kedelai "M.B.E" sebagai pembungkus produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Rata-rata biaya plastik yang dikeluarkan industri bubuk kedelai "M.B.E" ini adalah sebesar Rp 23.000 untuk satu kali produksi dengan harga beli plastik Rp 23.000/kg (Lampiran 8 dan 9).

4.5.4.3 Biaya-Biaya Non Produksi

4.5.4.3.1 Biaya Penyusutan Peralatan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk lebih memudahkan responden dalam melakukan berbagai kegiatan produksinya maka responden menggunakan alat-alat pertanian seperti mesin dompeng, penggiling, Tungku Uap, Bak Rebus, Cincin, Keranjang, Ember, Pisau, Cetakan, Kual, Pompa Air, mesin pengepak (Lampiran 10 dan lampiran 11).

Macam dan jumlah alat-alat yang digunakan oleh industri dipengaruhi oleh jenis usaha dan banyaknya produksi yang mereka lakukan. Pada Industri yang kecil dan sederhana maka alat yang digunakan juga sedikit dan sederhana. Tetapi pada industri yang besar dan maju, industrinya juga mempunyai alat-alat yang modern. Mesin dan alat-alat mekanik akan memperlancar pekerjaan dan memungkinkan mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan tanpa alat-alat

mekanik. Bahkan dengan alat-alat akan memberikan hasil yang lebih baik dan waktu yang lebih pendek. Namun, untuk itu memerlukan biaya yang besar. Oleh sebab itu, pembelian alat haruslah sesuai dengan kebutuhan industri sehingga pemilihan alat yang tepat akan dapat meningkatkan efisiensi.

Diharapkan dengan adanya tambahan peralatan ini, sistem operasional yang dilakukan responden akan semakin baik. Sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan produksi dan pendapatan pemilik industri.

4.5.4.3.2 Bunga Pinjaman

Berdasarkan Bunga pinjaman yang diberikan oleh BPR kepada para industri berbeda satu sama lainnya. Hal ini tergantung dari besarnya jumlah pinjaman yang diajukan oleh Industri dan pada umumnya pihak BPR selalu memberikan pinjaman kredit sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan masing-masing industri tersebut dimana industri tahu "CNG" ditetapkan bunga sebesar 20% per tahun karena berdasarkan ketentuan tingkat suku bunga dari PT.BPR Solok Sakato jika pinjaman diatas Rp 10.000.000 sampai Rp 25.000.000 dikenakan bungan pinjaman sebesar 20% per tahun. Sedangkan industri tahu "A.B" dan industri bubuk kedelai/jahe "M.B.E" ditetapkan bunga sebesar 21% per tahun karena jika pinjaman kredit sampai dengan Rp 10.000.000 pada PT.BPR Solok Sakato dikenakan bungan pinjaman sebesar 21% per tahun.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa total rata-rata bunga pinjaman per bulan yang dikeluarkan oleh indutri adalah sebesar Rp 706.364,67. Besarnya bunga pinjaman yang dikeluarkan oleh BPR kepada industri dapat dilihat pada tabel 28.

Tabel 28. Besarnya bunga pinjaman yang dikeluarkan oleh BPR kepada industri

No	Industri	Jumlah Pinjaman / bulan	Bunga Pinjaman / bulan	Total Pinjaman / bulan
1	Industri Tahu "CNG"	Rp 833.333	Rp 13.888	Rp 847.221
2	Industri Tahu "A.B"	Rp. 833.333	Rp 14.583	Rp 847.916
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	Rp. 416.666	Rp 7.291	Rp 423.957
	Rata-rata	Rp. 694.444	Rp 11.920,66	Rp 706.364,67

4.5.4.4 Keuntungan

Kuntungan merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya total. Besarnya keuntungan yang diterima oleh masing-masing industri berbeda satu sama lainnya. Hal ini tergantung dari berapa besarnya jumlah produksi dan biaya yang dikeluarkan oleh industri tersebut. Untuk lebih jelasnya, pada Tabel 31 disajikan data tentang besarnya keuntungan masing-masing industri sebelum dan setelah menerima kredit dari BPR.

Tabel 31. Besarnya keuntungan industri sebelum dan sesudah meminjam di BPR

No	Industri	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Persentase Kenaikan (%)
1	Idustri Tahu "CNG"	1.898.852	2.175.479	14,57
2	Industri Tahu "A.B"	937.315	1.469.555	56,78
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	2.964.885	4.425.223	49,25

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat peningkatan keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing industri setelah mereka mendapatkan pinjaman kredit. Dari tabel diatas tingkat keuntungan terbesar setelah mendapatkan pinjaman kredit dari BPR diperoleh industri bubuk kedelai dan jahe "MBE" yaitu sebesar Rp 4.425.223 dimana tingkat keuntungan sebelum meminjam kredit pada BPR Solok Sakato adalah sebesar Rp 2.964.885. Hal ini dikarenakan produk yang diproduksi oleh industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E" beragam (Lampiran 14 dan 15).

4.5.4. Peran dan Pengaruh Kredit PT.BPR

4.5.4.1 Peranan Kredit Terhadap IKM Pengolahan Hasil Pertanian di Kota Solok.

Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan, yang berarti bahwa seseorang/kelompok atau lembaga telah melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Anonim, 2003). Peranan kredit PT.BPR berdasarkan fungsi kredit sebagai penambah modal IKM untuk menunjang kegiatan produksi telah berjalan sebagaimana mestinya, dimana masing-masing IKM telah mendapatkan

bantuan kredit yang disalurkan PT.BPR sesuai dengan besarnya kredit yang diajukan IKM. Pemanfaatan kredit PT.BPR ternyata dapat membuktikan bahwa umumnya usaha IKM yang memanfaatkan kredit BPR untuk perkembangan usahanya mengalami peningkatan dibandingkan industri tersebut sebelum menerima pinjaman kredit. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah modal yang sesuai dengan kredit yang disalurkan oleh PT. BPR kepada masing-masing IKM, dimana industri tahu "CNG" menerima Pinjaman Rp 20.000.000, industri tahu "AB" menerima Pinjaman Rp 10.000.000, dan industri bubuk kedelai/jahe "MBE" menerima Pinjaman Rp 10.000.000. Kredit yang diterima dimanfaatkan untuk segala hal yang mendukung peningkatan produksi dan penunjang produksi mulai dari kegiatan produksi sampai pemasaran produksi. Pada industri tahu "CNG" pemanfaatan kredit yang diterima digunakan sebanyak 50,32 % dan 49,68 % lagi dimasukkan kedalam kas industri, industri tahu "AB" pemanfaatan kredit yang digunakan sebanyak 50,58 % dan 49,42 % lagi dimasukkan kedalam kas industri, dan industri bubuk kedelai/jahe "MBE" pemanfaatan kredit yang digunakan sebanyak 19,24 % dan 80,58 % lagi dimasukkan kedalam kas industri. Jika tiap industri mengalami perkembangan dan peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya maka kredit yang didapatkan sangat membantu perkembangan usaha yang sedang dijalankan.

Dengan demikian, secara langsung kredit BPR memiliki peranan bagi perkembangan IKM. Peranan penting BPR terhadap pengembangan IKM pengolahan hasil pertanian dapat dilihat dari seberapa besar manfaat yang didapatkan IKM tersebut dalam menggunakan kredit yang diberikan untuk meningkatkan aktifitas produksi usaha dan penunjang lainnya agar lebih maju dan makin baik. Dari gambaran umum tentang perkembangan IKM yang menjadi sampel dalam penelitian yang meminjam di BPR membuktikan bahwa terdapat perbedaan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa peranan BPR terhadap penambahan / peningkatan jumlah produksi suatu usaha sangat berpengaruh dan akan berdampak pada peningkatan pendapatan pada industri tersebut, karena dengan jumlah modal yang biasanya hanya untuk jumlah produksi yang terbatas sesuai kemampuan modal usaha yang dimilikinya, dapat lebih ditingkatkan dengan adanya

tambahan modal dari BPR. Menurut Sumodiningrat (1999), menyatakan bahwa sistem kredit yang ideal harus mencerminkan adanya sistem yang dikelola sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga menguntungkan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

4.5.4.2 Pengaruh Kredit Terhadap IKM Pengolahan Hasil Pertanian di Kota Solok.

Pengaruh adalah suatu kemampuan yang dapat membentuk ataupun mengubah sesuatu baik secara langsung atau tidak langsung (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Adanya kredit yang diterima IKM akan dapat berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung, rendah ataupun tinggi terhadap perkembangan suatu usaha. Peningkatan yang terjadi pada setiap industri akan mampu mempengaruhi pendapatan dan keuntungan yang akan diperoleh.

Pengaruh dari kredit BPR tidak hanya dilihat dari perkembangan volume produksi dan penjualan, peningkatan luas daerah pemasaran, maupun peningkatan penggunaan tenaga kerja saja, tetapi juga dapat dilihat dari tingkat keuntungan yang diperoleh oleh industri sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari BPR Solok Sakato. Tingkat keuntungan terbesar setelah mendapatkan pinjaman kredit dari BPR diperoleh industri bubuk kedelai dan jahe "MBE" yaitu sebesar Rp 5.515.223 dimana tingkat keuntungan sebelum meminjam kredit pada BPR Solok Sakato adalah sebesar Rp 2.964.885. Tingkat keuntungan terkecil diperoleh oleh industri tahu "A.B" yaitu sebesar Rp 1.469.555. Dimana tingkat keuntungan yang diperoleh sebelum mendapatkan bantuan kredit adalah sebesar Rp. 937.315. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa peranan BPR terhadap penambahan/peningkatan jumlah produksi suatu industri sangat berpengaruh dan akan berdampak pada peningkatan keuntungan pada industri tersebut, karena dengan jumlah modal yang biasanya hanya untuk jumlah produksi yang terbatas sesuai kemampuan modal usaha yang dimilikinya, dapat lebih ditingkatkan dengan adanya tambahan modal dari BPR. Menurut Suyatno, dkk (1995), menyatakan bahwa pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan baik bagi pihak BPR maupun nasabah itu sendiri. Program kredit yang diberikan diprioritaskan untuk masyarakat yang ingin

meningkatkan pendapatan dari hasil usaha mereka, pemberian kredit juga harus melalui pemilihan nasabah secara selektif sehingga tidak terjadi kredit macet dan penyalahgunaan kredit.

Peranan BPR baru dapat dirasakan untuk pengembangan IKM, apabila kredit tersebut benar-benar digunakan untuk peningkatan / penambahan segala kebutuhan usaha dengan cara memperhatikan hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan agar usaha dapat berkembang dengan pesat. Hal ini senada menurut Mubyarto (1997), bahwa dengan adanya kredit akan dapat menciptakan usaha yang lebih berkembang dan merangsang bagi siapapun yang ingin membuka usaha baru. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga responden yang meminjam kredit pada BPR, umumnya mereka sangat merasakan manfaat dari kredit yang mereka terima bagi kelangsungan dan perkembangan usaha mereka.

Kredit yang diberikan BPR ternyata dapat memberikan pengaruh yang positif dalam menggerakkan aktifitas IKM yang terhambat akibat masalah modal. Peningkatan peranan BPR dapat dilakukan baik dalam hal Peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan diutamakan untuk IKM yang umumnya mengalami kendala keterbatasan modal dalam usahanya, ataupun dalam hal mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Senada dengan kajian yang ditemukan oleh Donna (2005), bahwa peranan perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan volume usaha sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah :

- 1) Secara umum pelaksanaan prosedur pengajuan dan pengembalian kredit sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, ada beberapa pelaksanaan proses administrasi untuk pengajuan kredit oleh industri menurut pihak BPR yang kurang sesuai dengan pelaksanaan pada nasabah yang meminjam kredit tersebut, diantaranya :
 - a. Ketidak lengkapan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi IKM seperti laporan keuangan, IKM tidak dengan jelas membuat gambaran kondisi usaha yang sedang dikelola, serta rencana penggunaan kredit yang akan diberikan ke BPR sehingga waktu pemberian kredit juga makin lama terealisasi.
 - b. Terkait lamanya proses pencairan kredit, berdasarkan petunjuk teknis dari BPR, lama proses pencairan kredit dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 sampai dengan 2 minggu, tetapi ada pada salah satu responden yang baru mendapatkan kredit dalam kisaran waktu 2 bulan.
 - c. Pengawasan setelah kredit cair dilakukan minimal setiap 3 bulan, tetapi pada kenyataannya dilapangan, pengawasan sering kali dilakukan dengan waktu yang tidak ditetapkan.
- 2) Identifikasi alasan-alasan industri masih sedikit sekali meminjam kredit pada PT.BPR, yaitu:
 - a. Bunga BPR yang tinggi, yaitu dengan presentase tanggapan dari responden sebesar 28,57 %.
 - b. Jaminan yang besar, yaitu dengan persentase sebesar 28,57 %.
 - c. Tidak tahu informasi dan cara pengajuan kredit, yaitu dengan persentase tanggapan dari responden sebesar 28,57%.

- d. Membutuhkan waktu yang lama sehingga industri belum memanfaatkan pinjaman kredit dari BPR. Jumlah persentasenya adalah 14,28 %.
- 3) Peranan dan pengaruh BPR dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya perkembangan volume produksi dan penjualan, perkembangan daerah pemasaran, jumlah dan biaya tenaga kerja, serta tingkat keuntungan yang diperoleh IKM setelah meminjam kredit. Dari aspek tersebut dapat dilihat:
- a. Perkembangan volume produksi dan penjualan industri tahu "AB" adalah 60%, industri tahu "M.B.E", sebesar 50%, dan industri tahu "CNG" adalah sebesar 25%.
 - b. Pada industri tahu "CNG" perkembangan daerah pemasarannya adalah Sijunjung dan Padang Panjang, sedangkan industri tahu "A.B" sekarang hasil produknya sudah sampai di Kab.Sawahlunto dan industri bubuk kedelai/jahe "M.B.E" hasil produknya sudah di pasarkan ke Pekan Baru dan Medan.
 - c. Perkembangan total biaya tenaga kerja paling tinggi yaitu pada industri tahu "CNG" sebesar Rp 1.100.000 sedangkan perkembangan tenaga kerja yang paling rendah adalah pada industri bubuk kedelai dan jahe "M.B.E" yaitu sebesar Rp 250.000.
 - d. Keuntungan yang diperoleh industri pengolahan hasil pertanian setelah mendapatkan pinjaman kredit dari BPR mengalami kenaikan. Industri tahu "CNG" keuntungannya sebesar Rp 2.175.479, industri tahu "A.B" sebesar Rp 1.469.223 dan industri bubuk kedelai dan jahe sebesar Rp 4.425.223.

5.2 Saran

- 1) Prosedur pelaksanaan kredit yang dibuat oleh pihak BPR hendaknya lebih baik, dalam artian segala ketentuan yang ada dapat dijalankan sesuai dengan pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan agar calon nasabah tidak mengalami kesalahan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pihak BPR.

- 2) Pada sistim pengawasan kredit hendaknya pejabat kredit selalu melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan sehingga komunikasi dengan debitur tetap intensif dan perkembangan usaha debitur dapat diketahui.
- 3) Untuk memperlancar urusan operasional BPR, pihak manajemen harus memperhatikan masalah yang ada dalam perusahaan diantaranya dengan menambah Inventaris armada kendaraan operasinal, merekrut beberapa tenaga kerja untuk ditempatkan dilapangan dan menambah karyawan supaya tidak terjadi lagi jabatan rangkap dalam perusahaan.
- 4) Pemanfaatan kredit oleh IKM sebaiknya lebih banyak dialokasikan untuk peningkatan volume produksi karena akan berdampak positif pula terhadap peningkatan volume penjualan, daerah pemasaran dan keuntungan dalam usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2003. *Peran Sektor Usaha Kecil Menengah*. <http://www.apkasi.or.id/modelus.php?name=news&file=article&sid=109>[8 Maret 2007].
- _____. 2004. *Indikator Makro Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2003*. <http://www.depkop.co.id> [8 Maret 2007].
- Badrudin. Rudy, M.Si. Dosen Luar Biasa FISIP UAJY. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. <http://www.stieykpn.ac.id> . [Rabu. 18 Februari 2009. 14.30 WIB].
- Batubara, AR. 2005. *Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan, Gagasan Pembentukan dan Pembinaan*. LIPI. Jakarta.
- Basri, Hasan. 2000. *Perbandingan Tingkat Kesehatan BPR Konvensional dengan BPR Syariah : Studi Kasus pada PT BPR Sungai Puar dan PT BPRS Carana Kiat Andalas di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Darmawi, Herman. 1993. *Efektifitas Bank Perkreditan Rakyat di Sumatera Barat*. Laporan Penelitian FEUA, Padang.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Kredit*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Depperindag. 2001. *Industri Perdagangan Sumatera Barat dalam angka*. Padang. Sumatera Barat.
- Depperindag. 2009. *Industri Perdagangan Sumatera Barat dalam angka*. Solok.
- Dept. Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. 1996. *UU RI No.9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil*. Kanwil Propinsi Sumbar. Padang.
- Djumhana. 2003. *Manajemen Kredit*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Gustaviyani, Efni. 2003. *Perbandingan Pengelolaan Penyaluran dan Pengembalian Kredit antara BPR Syariah dengan BPR Konvensional: Studi Kasus pada PT BPR Sungai Puar dan PT BPRS Carana Kiat Andalas di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

- Hadiwidjaja dan Wirasasmita. 2000. *Analisis Kredit*. Pionir Jaya. Bandung.
- Harti, Dessi Widya. 2008. *Peranan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Perkebunan dan Perdagangan Karet pada PT BPR Koto VII Kabupaten Sijunjung*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas
- Karim, Adi Warman. 2003. *Menimbang Resiko Kredit di Bank Syariah*. Majalah Investor No. 88 Tahun V. Jakarta.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. PT. Rja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Rja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2004. *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2005. *Pemasaran bank*. Jakarta : Kencana.
- Malayu. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi aksara. Jakarta.
- Mulyono. 1999. *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*. Edisi Revisi. Djambatan. Jakarta.
- Munawir, S. 1995. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Nasution, Muslimin. 1997. *Pembangunan Ekonomi Nasional, Suatu Pendekatan Pemerataan Keadilan dan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta. Intermedia.
- Nainggolan, Kaman. 2005. *Pertanian Indonesia Kini dan Esok*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Putra, Yuliandri. 2008. *Pengaruh Program Dana Bergulir dalam Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Payakumbuh*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Purbo, O.W. 2007. Pola Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah. <http://www.smeccda.com>[8 Maret 2007].
- Ridjin, Ketut. 2003. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Santoso. 1999. *Mengenal Dunia Perbankan*. Andi Offset. Yogyakarta.

- Sinungan. 1993. *Manajemen Dana Bank. Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekartawi. 1999. *Pengantar Agroindustri*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2000. *Pengantar Agroindustri*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2003. *Agribisnis Teori dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarsono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia. Yogyakarta.
- _____. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Susilobroto, Bambang. 2001. *Potensi UKM di Sumatera Barat*. Padang Ekspres Edisi No. 845. Padang.
- Suyatno, Thomas. 1992. *Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi ketiga*. Gramedia. Jakarta.
- _____. 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- _____. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Keempat*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 1999. *Perkembangan Industri Kecil di Indonesia*. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Untung, B. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi. Yogyakarta.
- Wibowo, S. 2002. *Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil*. Swadaya. Jakarta.
- Zulkarnaen. 2003. *Membangun Ekonomi Rakyat, Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta.

Lampiran 1. Perkembangan Industri Kecil Menengah Pengolahan Hasil Pertanian dan Tenaga Kerja di Kota Solok Berdasarkan Izin Usaha.

No	Tahun	Jumlah (Unit Industri)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1	2006	51	283
2	2007	53	297
3	2008	60	348
Total		60	348

Sumber : Dinas perindustrian dan perdagangan, 2008

Lampiran 2. Nama-nama BPR di Kabupaten Solok

No.	Nama BPR	Status	Alamat	No. Telep	Dati II	Dati I
1	PT BPR Sarantau Sasurambi	Pusat	JL. IMAM BONJOL JRG.PSR.M.LABUH NAG.KOTO BARU KEC.SELPAGU KAB. SOLOK SELATAN		Kab/Kota Lainnya	Sumatera Barat
2	PT. BPR Sangir	Pusat	DURIAN TARUNG KEC. SANGIR KAB. SOLOK SELATAN	0755 – 583253	Kab/Kota Lainnya	Sumatera Barat
3	BPR LPN Saning Bakar	Pusat	JL.RAYA S.BAKAR SOLOK KM 14 KABUPATEN SOLOK	0755 – 380788	Kab. Solok Selatan	Sumatera Barat
4	BPR LPN Guguk Sarai	Pusat	JL.LINTAS SUMATERA KM.4 SAOK LAWEH KECAMATAN KUBUNG	0755 – 23407	Kab. Solok Selatan	Sumatera Barat
5	PT BPR Solok Sakato	Pusat	JL. DT PARPATIH NAN SABATANG NO. 273 C AIR MATI	0755 - 21518/2 2733	Kota Solok	Sumatera Barat
6	PT. BPR Surya Katialo	Pusat	JL. DT. PERPATIH NAN SABATANG 6A AIR MATI SOLOK	0755 – 390010	Kota Solok	Sumatera Barat

Sumber: Bank Indonesia, 2007

Lampiran 3. Nama-nama Industri Pengolahan Hasil Pertanian di Kota Solok.

No	Nama Industri	Alamat	Tahun dikeluarkan Izin	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Jenis Produk
1	MELATI	Simpang Rumbio	2000	3	Dodol Sirsak
2	SUMBER JAYA	Kampai Tabu Karambia	2001	7	Sari Buah
3	TEPUNG	Koto Panjang	2001	2	Tepung Beras
4	ANTROS	Koto Panjang	2005	2	Tepung Beras
5	ANITA KUE	Aro IV Korong	2002	2	Roti
6	TIGA SAUDARA	VI Suku	1998	8	Roti
7	RAMAYANA	VI Suku	2001	3	Roti
8	ROTI RANDI	Kampai Tabu Karambia	2002	4	Roti
9	RINI BAKERY	Aro IV Korong	2002	6	Roti
10	INTAN BAKERY	Simpang Rumbio	2002	2	Roti
11	BIRUHUN BAKERY	Simpang Rumbio	1993	5	Roti
12	TAMTIR	Koto Panjang	1992	4	Roti
13	MESRA	Pasar Pandan Air Mati	1997	4	Roti
14	ANDIKA	Tanjung Paku	1997	10	Roti
15	SALAM	Tanjung Paku	1997	6	Roti
16	SERASA	Tanjung Paku	2003	7	Roti
17	PANCA PUTRI	Pasar Pandan Air Mati	2004	7	Roti
18	SUCI MESRA	Pasar Pandan Air Mati	2006	5	Roti
19	YOLA	Pasar Pandan Air Mati	2008	7	Kue Kering dan Bolu
20	GELAS TANGKAI	Aro IV Korong	1996	7	Bubuk Kopi
21	GELAS BUNGA	Aro IV Korong	1998	3	Bubuk Kopi
22	GELAS TANGKAI ASLI	Kampai Tabu Karambia	1998	3	Bubuk Kopi
23	JAM GADANG	VI Suku	1998	3	Bubuk Kopi
24	BINTANG TIGA	Pasar Pandan Air Mati	1998	3	Bubuk Kopi
25	HONDA	Pasar Pandan Air Mati	1991	3	Bubuk Kopi
26	TIMB. DUDUK	Pasar Pandan Air Mati	1992	4	Bubuk Kopi
27	TIMB. GANTUNG	Pasar Pandan Air Mati	1993	4	Bubuk Kopi
28	TIMB. MAS	Pasar Pandan Air Mati	1991	10	Bubuk Kopi
29	ANAK TIMB. MAS	Pasar Pandan Air Mati	2002	5	Bubuk Kopi
30	TIMB. MAS MURNI	Pasar Pandan Air Mati	2003	10	Bubuk Kopi
31	HIDAYAH	Tanjung Paku	2008	8	Bubuk Kopi
32	SUMBER KARYA	VI Suku	1992	4	Tahu
33	SUKA MAJU	VI Suku	1992	6	Tahu
34	SINAPA / PTS	Sinapa Piliang	1994	6	Tahu
35	VINNTES	Aro IV Korong	2002	5	Tahu
36	CNG	Tanah Garam	2004	20	Tahu
37	SGU	Koto Panjang	2004	12	Tahu
38	PUTRI TUNGGAL	VI Suku	2008	17	Tahu
39	ABHI BERSAUDARA	Kapai Tabu Karambia	2008	6	Tahu
40	DUA ANGSA	Simpang Rumbio	2006	5	Kacang Kulit
41	USAHA IKLAS / INDUSTRI BUBUK KEDELAI M.B.E	Simpang Rumbio	2008	5	Kedelai Bubuk
42	INTISARI	VI Suku	1990	3	Kerupuk
43	ERMAWATI	Tanjung Paku	1990	3	Kerupuk

44	GINDO	Kampung Jawa	1990	6	Kerupuk
45	SINGGALANG	Tanjung Paku	1996	6	Kerupuk
46	SUMBER PUTRA	Koto Panjang	1991	3	Kerupuk
47	BINTANG MAS	Tanjung Paku	2005	10	Kerupuk
48	USAHA BERSAMA	Kampung Jawa	2006	10	Karak Kaliang
49	SINAR JAYA	Nan Balimo	2007	6	Kipang & Bolu
50	KUE 88	Kampung Jawa	2007	8	Karak Kaliang
51	MONA	Nan Balimo	2008	11	Kripik & Peyek
52	CUN BAWANG GORENG	Pasar Pandan Air Mati	2008	4	Bawang Goreng
53	BELIBIS	Kampung Jawa	1997	3	Bolu
54	CITA RASA	Tanjung Paku	1997	3	Bolu
55	SERASA	Tanjung Paku	2003	15	Bolu
56	REVA	Koto Panjang	1994	4	Bolu
57	SAIYO CATERING	Pasar Pandan Air Mati	1997	4	Bolu
58	TOKO INDAH	Koto Panjang	2006	4	Kue-Kue
59	INSTAN	Koto Baru	1997	5	Kedelai Bubuk
60	JAYA	Tanjung Harapan	1998	4	Kedelai Bubuk

Sumber : Dinas perindustrian dan perdagangan, 2008

Lampiran 4. Data Kucuran Kredit yang diberikan PT.BPR Solok Sakato, Kota Solok.

Data Kucuran Kredit PT.BPR Solok Sakato

Per 31 Desember 2007

No	Uraian	Jumlah Nasabah (Orang)	Nominal (dalam Rp 000,-)
1	Jenis Penggunaan		
	a. Modal Kerja	117	534,725
	b. Investasi	241	1,365,071
	c. Konsumsi	42	327,246
	d. Lain-lain	131	725,326
	Jumlah	531	2,952,368
2	Sektor Ekonomi		
	a. Pertanian	10	72,861
	b. Perindustrian	18	69,544
	c. Perdagangan	260	1,284,770
	d. Jasa-jasa	70	472,621
	e. Lain-lain	173	1,052,572
	Jumlah	531	2,952,368
3	Collectibility		
	a. Lancar	511	2,871,897
	b. Kurang Lancar	3	10,496
	c. Diragukan	1	20,833
	d. Macet	16	49,142
	Jumlah	531	2,952,368

Data Kucuran Kredit PT.BPR Solok Sakato

Per 31 Desember 2008

No	Uraian	Jumlah Nasabah (Orang)	Nominal (dalam Rp 000,-)
1	Jenis Penggunaan		
	a. Modal Kerja	216	609,019
	b. Investasi	285	2,203,975
	c. Konsumsi	62	526,216
	d. Lain-lain	224	1,281,174
	Jumlah	787	4,620,384
2	Sektor Ekonomi		
	a. Pertanian	27	169,791
	b. Perindustrian	17	64,991
	c. Perdagangan	385	1,907,845
	d. Jasa-jasa	72	670,367
	e. Lain-lain	286	1,807,390
	Jumlah	787	4,620,384
3	Collectibility		
	a. Lancar	776	4,566,529
	b. Kurang Lancar	0	0
	c. Diragukan	1	1,362
	d. Macet	10	52,493
	Jumlah	787	4,620,384

Sumber : PT.BPR Solok Sakato, Kota Solok.

Lampiran 5. Daftar Nama Perusahaan/IKM Pengolahan Hasil Pertanian di Kota Solok
Berdasarkan Jenis Produk

No	Jenis Komoditi Industri Pengolahan di Bidang Pertanian	Jumlah		
		Unit Usaha	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (dalam Rp.000)
1	Industri Roti & Sejenisnya	21	106	473,910
2	Industri Kerupuk & Sejenisnya	10	66	177,340
3	Industri Tahu	8	76	331,275
4	Industri Pelumatan Buah dan Sayuran	2	10	14,000
5	Industri Pengolahan Kopi	12	63	215,000
6	Industri Berbagai macam tepung	5	15	41,150
7	Industri Makanan Lainnya	2	9	107,101
Total		60	345	

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2009

Lampiran 6. Daftar Nama IKM Pengolahan Hasil Pertanian yang terlibat peminjaman dengan BPR di Kota Solok

No	Jenis Usaha	Alamat	Plafond (Rp)	Bln / Thn
1	Industi Roti/Kue	Jl. Batang Lembang Kel. VI Suku Kota Solok	5,000,000	Jan 2008
2	Industri Tahu "CNG"	Jl. Sersan Basir Gawan RT/RW 01/04 Kel. Tanah Garam	20,000,000	Jan 2008
3	Industri Bubuk Kedelai, Jahe	Jl. Reformasi No.15 RT/RW 02/03 Kel. Simp Rumbio Solok	10,000,000	Jan 2008
4	Industri Tahu "A.B"	Jl. Prof Dr Hamka No.28 L.Pandan Kel. KTK	10,000,000	Maret 2008
Total			45,000,000	

Sumber : PT.BPR Solok Sakato, Kota Solok tahun 2009

Lampiran 7. Kriteria Golongan Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja dan Omset Tahun 2007.

No	Kriteria Industri	Jumlah Tenaga Kerja	Omset Perusahaan
1	Industri Mikro	1- 4 orang	Rp. 1 Milyar kebawah
2	Industri kecil	5- 19 orang	Rp. 1 Milyar kebawah
3	Industri Menengah	22- 99 orang	Rp. 1- 50 Milyar
4	Industri besar	Diatas 100 orang	Rp. Diatas 50 Milyar

Sumber : Depperindag Sumatera Barat, 2007

Lampiran 8. Biaya produksi per Industri sebelum mendapatkan bantuan kredit
Industri Tahu "CNG"

No	Keterangan	Penggunaan 1 kali produksi	Biaya / Hr	Total Biaya / Hr
1	Biaya Bahan Baku			
	Kacang Kedelai	1200	5 600	6 720 000
2	Biaya Tenaga Kerja	17	55 000	935 000
3	Biaya Solar	17	4300	73 100
5	Biaya Kayu Bakar	1	125000	125000
6	Cuka	0,014	301,37	301,37
7	Pajak		10000	10000
8	Biaya Air		8333,33	8333,33
9	Biaya Listrik		1000	1000
				7 872 735

Industri Tahu "A.B"

No	Keterangan	Penggunaan 1 kali produksi	Biaya / Hr	Total Biaya / Hr
1	Biaya Bahan Baku			
	Kacang Kedelai	500	5 600	2 800 000
2	Biaya Tenaga Kerja	4	55 000	220 000
3	Biaya Solar	7	4300	30 100
4	Biaya Kayu Bakar	0,5	125000	62500
5	Cuka	0,011	241,09	241,09
6	Pajak		10000	10000
7	Biaya Air		6666,66	6666,66
8	Biaya Listrik		666,66	666,66
				3 130 174

Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"

No	Keterangan	Penggunaan 1 kali produksi	Biaya / Hr	Total Biaya / Hr
1	Biaya Bahan Baku			
	Kacang Kedelai	40	5 600	224 000
	Jahe	55	10 000	550000
	Bubuk Cokelat	5	13 000	65000
2	Biaya Tenaga Kerja	3	50 000	150 000
4	Biaya Kayu Bakar	0,5	125000	62500
5	Pajak		10000	10000
6	Biaya Air		3333,33	3333,33
7	Biaya Listrik		666,66	666,66
8	Biaya Plastik	2	23000	46 000
				1 111 500

Lampiran 9. Biaya produksi per Industri setelah mendapatkan bantuan kredit
Industri Tahu "CNG"

No	Keterangan	Penggunaan 1 kali produksi	Biaya / Hr	Total Biaya / Hr
1	Biaya Bahan Baku			
	Kacang Kedelai	1500	5 600	8 400 000
2	Biaya Tenaga Kerja	20	55 000	1 100 000
3	Biaya Solar	20	4300	86 000
5	Biaya Kayu Bakar	1,5	125000	187500
6	Pajak		10000	10000
7	Cuka	0,022	482,19	482,19
8	Biaya Air		10000	10000
9	Biaya Listrik		1333,33	1333,33
				9 795 316

Industri Tahu "A.B"

No	Keterangan	Penggunaan 1 kali produksi	Biaya / Hr	Total Biaya / Hr
1	Biaya Bahan Baku			
	Kacang Kedelai	800	5 600	4 480 000
2	Biaya Tenaga Kerja	6	55 000	330 000
3	Biaya Solar	10	4300	43 000
4	Biaya Kayu Bakar	1	125000	125 000
5	Pajak		10000	10 000
6	Cuka	0,016	361,64	362
7	Biaya Air		10000	10 000
8	Biaya Listrik		1000	1 000
				4 999 362

Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"

No	Keterangan	Penggunaan 1 kali produksi	Biaya / Hr	Total Biaya / Hr
1	Biaya Bahan Baku			
	Kacang Kedelai	70	5 600	392 000
	Jahe	70	10 000	700000
	Bubuk Cokelat	10	13 000	130000
2	Biaya Tenaga Kerja	5	50 000	250 000
4	Biaya Kayu Bakar	1	125000	125000
5	Pajak		10000	10000
6	Biaya Air		5000	5000
7	Biaya Listrik		1000	1000
8	Biaya Plastik	3	23000	69 000
				1 682 000

Lampiran 10. Biaya Penyusutan Peralatan Industri sebeum meminjam di PT.BPR Solok Sakato (Tahun 2007)

Industri Tahu "CNG"

No	Nama Alat	Harga Beli (unit)	Jlh unit	UE (th)	NS (Rp)	D / Th (Rp)	D / Hr (Rp)	Total Penyusutan
1	Mesin Dompeng	3800000	3	5	2500000	260000	722	2166,67
2	Penggiling	2500000	2	8	1500000	125000	347	694,44
3	Tungku Uap	1000000	2	10	0	100000	278	555,56
4	Bak Rebus	500000	5	5	0	100000	278	1388,89
5	Cincin	300000	5	5	0	60000	167	833,33
6	Mobil 1	30000000	1	5	20000000	2000000	5556	5555,56
7	Mobil 2	28000000	1	4	20000000	2000000	5556	5555,56
8	Keranjang / Viber	85000	30	5	0	17000	47	1416,67
9	Ember	8500	4	5	0	1700	5	18,89
10	Pisau	5000	3	7	0	714,29	2	5,95
11	Cetakan	1500000	5	10	0	150000	417	2083,33
12	Kuali	25000	5	5	0	5000	14	69,44
13	Pompa air	200000	2	8	100000	12500	35	69,44
Jumlah						4831914	13422	20413,73

Industri Tahu "A.B"

No	Nama Alat	Harga Beli (unit)	Jlh unit	UE (th)	NS (Rp)	D / Th (Rp)	D / Hr (Rp)	Total Penyusutan
1	Mesin Dompeng	4000000	1	5	2500000	300000	833	833,33
2	Penggiling	3000000	1	8	1500000	187500	521	520,83
3	Tungku Uap	1200000	1	10	0	120000	333	333,33
4	Bak Rebus	400000	3	5	0	80000	222	666,67
5	Mobil	28000000	1	4	20000000	2000000	5556	5555,56
6	Cincin	350000	3	5	0	70000	194	583,33
7	Keranjang / Viber	100000	40	5	0	20000	56	2222,22
8	Ember	8500	3	5	0	1700	5	14,17
9	Pisau	10000	3	4	0	2500	7	20,83
10	Cetakan	1500000	4	10	0	150000	417	1666,67
11	Kuali	25000	3	5	0	5000	14	41,67
12	Pompa Air	250000	1	8	100000	18750	52	52,08
Jumlah						2955450	8210	12511

Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"

No	Nama Alat	Harga Beli (unit)	Jlh unit	UE (th)	NS (Rp)	D / Th (Rp)	D / Hr (Rp)	Total Penyusutan
1	Tungku	200000	1	5	0	40000	111	111,11
2	Kuali	45000	1	5	0	9000	25	25,00
3	Sendok Gorengan	15000	1	5	0	3000	8	8,33
4	Penggiling	3000000	1	10	1500000	150000	417	416,67
5	Saringan	12000	1	4	0	3000	8	8,33
6	Baskom	8500	4	5	0	1700	5	18,89
7	Gunting	3500	3	5	0	700	2	5,83
8	Mesin /pengepakan	160000	1	10	80000	8000	22	22,22
Jumlah						215400,00	598,33	616,39

Lampiran 11. Biaya Penyusutan Peralatan Industri setelah meminjam di PT.BPR Solok Sakato (Tahun 2008)

Industri Tahu "CNG"

No	Nama Alat	Harga Beli (unit)	Jlh unit	UE (th)	NS (Rp)	D / Th (Rp)	D / Hr (Rp)	Total Penyusutan
1	Mesin Dompeng	3800000	3	5	2500000	260000	722	2166,67
2	Penggiling	2500000	3	8	1500000	125000	347	1041,67
3	Tungku Uap	1000000	2	10	0	100000	278	555,56
4	Bak Rebus	500000	5	5	0	100000	278	1388,89
5	Cincin	300000	5	5	0	60000	167	833,33
6	Mobil 1	30000000	1	5	20000000	2000000	5556	5555,56
7	Mobil 2	28000000	1	4	20000000	2000000	5556	5555,56
8	Keranjang / Viber	85000	40	5	0	17000	47	1888,89
9	Ember	8500	6	5	0	1700	5	28,33
10	Pisau	5000	3	7	0	714,29	2	5,95
11	Cetakan	1500000	5	10	0	150000	417	2083,33
12	Kuali	25000	5	5	0	5000	14	69,44
13	Pompa air	200000	2	8	100000	12500	35	69,44
Jumlah						4831914	13422	21242,62

Industri Tahu "A.B"

No	Nama Alat	Harga Beli (unit)	Jlh unit	UE (th)	NS (Rp)	D / Th (Rp)	D / Hr (Rp)	Total Penyusutan
1	Mesin Dompeng	4000000	1	5	2500000	300000	833	833,33
2	Penggiling	3000000	2	8	1500000	187500	521	1041,67
3	Tungku Uap	1200000	1	10	0	120000	333	333,33
4	Bak Rebus	400000	3	5	0	80000	222	666,67
5	Mobil	28000000	1	4	20000000	2000000	5556	5555,56
6	Cincin	350000	3	5	0	70000	194	583,33
7	Keranjang / Viber	100000	50	5	0	20000	56	2777,78
8	Ember	8500	5	5	0	1700	5	23,61
9	Pisau	10000	3	4	0	2500	7	20,83
10	Cetakan	1500000	4	10	0	150000	417	1666,67
11	Kuali	25000	3	5	0	5000	14	41,67
12	Pompa Air	250000	1	8	100000	18750	52	52,08
Jumlah						2955450	8210	13597

Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"

No	Nama Alat	Harga Beli (unit)	Jlh unit	UE (th)	NS (Rp)	D / Th (Rp)	D / Hr (Rp)	Total Penyusutan
1	Tungku	200000	4	5	0	40000	111	444,44
2	Kuali	45000	4	5	0	9000	25	100,00
3	Sendok Gorengan	15000	3	5	0	3000	8	25,00
4	Penggiling	3000000	2	10	1500000	150000	417	833,33
5	Saringan	12000	4	4	0	3000	8	33,33
6	Baskom	8500	10	5	0	1700	5	47,22
7	Gunting	3500	4	5	0	700	2	7,78
8	Mesin /pengepakan	160000	2	10	80000	8000	22	44,44
Jumlah						215400,00	598,33	1535,56

Lampiran 12. Total Biaya Produksi Per Industri Sebelum Mendapatkan Bantuan Kredit

No	Nama Industri	Produksi (Kg)	Biaya-biaya										
			Bahan Baku (Rp)	Tenaga Kerja (Rp)	Solar (Rp)	Kayu Bakar (Rp)	Cuka (Rp)	Plastik	Air (Rp)	Listrik (Rp)	Penyusutan Peralatan (Rp)	PBB (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Industri Tahu "CNG"	1000	6720000	935000	73100	125000	301.37	0	8333.33	1000	20414	10000	7893148.43
2	Industri Tahu "A,B"	400	2800000	220000	30100	62500	241.09	0	6666.66	666.66	12511	10000	3142685.41
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	100											
	Bubuk Kedele	40	224000	50000	0	20833.33	0	23000	1111.11	222.22	205.46	3333	322705.12
	Bubuk Jahe	55	550000	50000	0	20833.33	0	23000	1111.11	222.22	205.46	3333	648705.12
	Bubuk Jahe Rasa Cokelat	5	65000	50000	0	20833.33	0	23000	1111.11	222.22	205.46	3333	163705.12
	Total	1600	10359000	1305000	103200	250000	542.46	69000	18333.3	2333.32	33541.11	29999	12170949.2
	Rata-rata	457.14	3453000.00	435000.00	34400.00	83333.33	180.82	23000	6111.11	777.77	11180.37	9999.67	4056983.07

Lampiran 13. Total Biaya Produksi Per Industri Setelah Mendapatkan Bantuan Kredit

No	Nama Industri	Produksi (Kg)	Biaya-biaya												Jumlah (Rp)
			Bahan Baku (Rp)	Tenaga Kerja (Rp)	Solar (Rp)	Kayu Bakar (Rp)	Cuka (Rp)	Plastik	Air (Rp)	Listrik (Rp)	Penyusutan Peralatan (Rp)	Biaya Pemasaran (Rp)	Bunga Pinjaman (Rp)	PBB (Rp)	
1	Industri Tahu "CNG"	1500	8400000	1100000	86000	187500	482.19	0	10000	1333.33	21243	247500	463	10000	10064521.07
2	Industri Tahu "A.B"	800	4480000	330000	43000	125000	361.64	0	10000	1000	13597	45000	486	10000	5058444.74
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	150													
	Bubuk Kedele	70	392000	83333.33	0	41666.67	0	23000	1666.66	333,33	511.85	80666.66	81.01	3333	626259.18
	Bubuk Jahe	70	700000	83333.33	0	41666.67	0	23000	1666.66	333,33	511.85	80666.66	81.01	3333	934259.18
	Bubuk Jahe Rasa Cokelat	10	130000	83333.33	0	41666.67	0	23000	1666.66	333,33	511.85	80666.66	81.01	3333	364259.18
	Total	2600	14102000	1679999.99	129000	437500.01	843.83	69000	24999.98	2333.33	36375.17	534500	1192.06	29999	17047743.35
	Rata-rata	742.86	4700666.67	560000.00	43000.00	145833.34	281.28	23000	8333.33	1555.55	12125.06	106900.00	397.35	9999.67	5682581.12

Lampiran 14. Keuntungan Industri sebelum Meminjam di BPR Solok Sakato Tahun 2008

No	Nama Industri	Produksi (Kg)	Produksi / papan atau bks	Harga Jual	Penerimaan (Rp)	Total Biaya	Keuntungan
1	Industri Tahu "CNG"	1200	288	34000	9792000	7893148,43	1898852
2	Industri Tahu "A.B"	500	120	34000	4080000	3142685,41	937315
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	100					
	Bubuk Kedele	40	200	9000	1800000	322705,12	1477295
	Bubuk Jahe	35	175	6000	1050000	648705,12	401295
	Bubuk Jahe Rasa Cokelat	25	125	10000	1250000	163705,12	1086295
	Total	1900	408	93000	17972000	12170949,2	5801050,8

Lampiran 15. Keuntungan Industri sesudah Meminjam di BPR Solok Sakato Tahun 2009

No	Nama Industri	Produksi (Kg)	Produksi / papan atau bks	Harga Jual	Penerimaan (Rp)	Total Biaya	Keuntungan
1	Industri Tahu "CNG"	1500	360	34000	12240000	10064521,07	2175479
2	Industri Tahu "A.B"	800	192	34000	6528000	5058444,74	1469555
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "M.B.E"	150					
	Bubuk Kedele	70	350	9000	3150000	626259,18	2523741
	Bubuk Jahe	40	200	6000	1200000	934259,18	265741
	Bubuk Jahe Rasa Cokelat	40	200	10000	2000000	364259,18	1635741
	Total	2600	552	93000	25118000	17047743,35	8070256,65

Lampiran 16. Persentase kenaikan peralatan dalam proses produksi

Industri "CNG"

No	Nama Alat	Harga Beli (unit)	Jlh unit sebelum meminjam	Jlh unit sesudah meminjam	Total Biaya	% Kenaikan biaya peralatan
1	Mesin Dompeng	3800000	3	3	0	
2	Penggiling	2500000	2	3	2500000	
3	Tungku Uap	1000000	2	2	0	
4	Bak Rebus	500000	5	5	0	
5	Cincin	300000	5	5	0	
6	Mobil 1	30000000	1	1	0	
7	Mobil 2	28000000	1	1	0	
8	Keranjang / Viber	85000	30	40	850000	
9	Ember	8500	4	6	17000	
10	Pisau	5000	3	3	0	
11	Cetakan	1500000	5	5	0	
12	Kuali	25000	5	5	0	
13	Pompa air	200000	2	2	0	
			68	81	3367000	16,83

Industri Tahu "A.B"

No	Nama Alat	Harga Beli (unit)	Jlh unit sebelum meminjam	Jlh unit sesudah meminjam	Total Biaya	% Kenaikan biaya peralatan
1	Mesin Dompeng	4000000	1	1	0	
2	Penggiling	3000000	1	2	3000000	
3	Tungku Uap	1200000	1	1	0	
4	Bak Rebus	400000	3	3	0	
5	Mobil	28000000	1	1	0	
6	Cincin	350000	3	3	0	
7	Keranjang / Viber	100000	40	50	1000000	
8	Ember	8500	3	5	17000	
9	Pisau	10000	3	3	0	
10	Cetakan	1500000	4	4	0	
11	Kuali	25000	3	3	0	
12	Pompa Air	250000	1	1	0	
			64	77	4017000	40,17

Industri "M.B.E"

No	Nama Alat	Harga Beli (unit)	Jlh unit sebelum meminjam	Jlh unit sesudah meminjam	Total Biaya	% Kenaikan biaya peralatan
1	Tungku	200000	1	4	600000	
2	Kuali	45000	1	4	135000	
3	Sendok Gorengan	15000	1	3	30000	
4	Penggiling	3000000	1	2	3000000	
5	Saringan	12000	1	4	36000	
6	Baskom	8500	4	10	51000	
7	Gunting	3500	3	4	3500	
8	Mesin /pengepak	160000	1	2	160000	
			13	33	4015500	40,15

Lampiran 17. Penggunaan Biaya Pemasaran

Industri Tahu "CNG"

No	Keterangan	Penggunaan	Harga / Biaya	Total
1	Bensin	55	4500	247500
2	Tenaga kerja	3	55000	165000
3	Viber	10	85000	850000
	Jumlah			1262500

Industri Tahu "AB"

No	Keterangan	Penggunaan	Harga / Biaya	Total
1	Bensin	10	4500	45000
2	Tenaga kerja	2	55000	110000
3	Viber	10	100000	1000000
	Jumlah			1155000

Industri Bubuk Kedelai dan Jahe "MBE"

No	Keterangan	Banyak Produk	Harga / Biaya	Total
1	Pengiriman kemedan	200	152000	152000
2	pengiriman ke P.Baru	200	90000	90000
	Jumlah			242000

Lampiran 18. Banyaknya Produk yang dipasarkan setelah meminjam kredit

NO	Industri	Daerah Pemasaran				
		Pdg. Panjang	Sawahlunto	Sijunjung	Pekan baru	Medan
1	Industri Tahu CNG	90		90		
2	Industri Tahu AB		96			
3	Industri Bubuk Kedelai dan Jahe MBE	350, 200, 200			200	200

Lampiran 19. Persentase Penggunaan Kredit oleh IKM yang Meminjam Kredit

Nama Industri	Total Pinjaman (Rp)	Total Penggunaan Pinjaman	Persentase
Industri Tahu "CNG"	20.000.000	10.064.521,07	50,32
Industri Tahu "AB"	10.000.000	5.058.444,74	50,58
Industri Bubuk Kedelai "MBE"	10.000.000	1.924.777,54	19,24

Lampiran 20. Dokumentasi Industri Kecil Menengah yang Meminjam Kredit di BPR
Solok Sakato di Kota Solok.

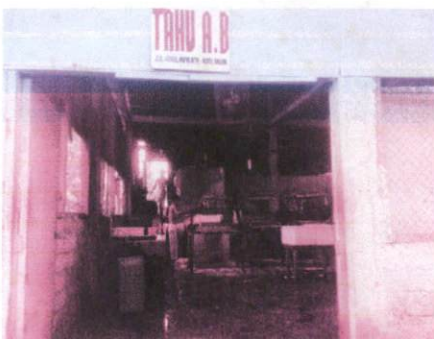
a. Industri Roti / Kue



b. Industri Tahu C.N.G



c. Industri Tahu A.B



d. Produk Industri M.B.E



Lampiran 21. Dokumentasi Industri Kecil Menengah Tidak Meminjam Kredit di BPR
Solok Sakato di Kota Solok.

a. Industri Tahu Puteri Tunggal



b. Industri Tahu S.G.U



e. Produk Industri "INSTAN"

